



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan karunia-Nya, kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2015, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Laporan ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menggambarkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016.

Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja kami masih belum sempurna. Karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja kami ke depan. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama selama ini.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan di masa yang akan datang.

Purwodadi, Maret 2016

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, SH, MM



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2015, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, Maret 2016

INSPEKTUR KABUPATEN GROBOGAN

ADI DJATMIKO, SH, MH
NIP. 19580819 198603 1 011



EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Grobogan, yaitu : "**Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.**" Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan 6 Misi 20 Tujuan dan 52 Sasaran Strategis dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016. Sehingga untuk mewujudkan Sasaran Strategis dimaksud, Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2015, terdiri dari sepuluh prioritas, yaitu :1)Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal, 2)Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan, 3)Peningkatan kualitas pelayanan publik, 4)Peningkatan pemerataan pembangunan, 5)Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 6)Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial, 7)Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua, 8)Peningkatan kesadaran hukum, 9)Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik, dan 10)Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas.

Terkait hal tersebut, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah merealisasikan Belanja Daerah sebesar 89,05% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2015 sebesar Rp. 2.223.149.637.431.-. Sedangkan target pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2015 adalah sebesar Rp. 2.006.226.129.000,- terealisasi sebesar 100,49%. Secara umum, capaian kinerja Sasaran Strategis tahun kelima RPJMD Kabupaten Grobogan 2011 – 2016 tercapai dengan **kualifikasi Sangat Baik (skor = 124,496%)** naik 13,487% dibanding capaian kinerja pada Tahun 2014 (skor 2014 = 111,009%). Sebagai bukti pendukung keberhasilan peningkatan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, selama Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima beberapa penghargaan tingkat nasional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, beberapa capaian indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penduduk	Orang	1.319.775	1.328.197	1.336.304	1.412.325	1.431.535
2	Angkatan Kerja	Orang	737.143	741.461	728.775	751.484	723.069



3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,33	4,2	6,1	4,25	5,22
4	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	227,778	214,617	198,967	186,53	-
5	Persentase Penduduk Miskin	%	17,38	16,13	14,87	13,86	-
6	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,41	66,39	67,43	67,77	-
7	Gini Ratio	-	0,32	0,35	0,34	0,34	-
8	PDRB ADHB*)	Juta Rupiah	13.886.641,62	15.217.430,31	16.621.487,57	18.164.846,24	-
9	PDRB ADHK*)	Juta Rupiah	13.172.711,96	13.842.047,14	14.471.228,93	15.053.762,36	-
10	PDRB per Kapita*)	Ribu Rupiah	9.981.029	10.421.682	10.829.294	11.201.049	-
11	Pertumbuhan Ekonomi*)	%	3,19	5,08	4,55	4,03	-
12	Inflasi	%	1,86	4,48	7,88	8,03	3,31

Dalam pelaporan LKjIP Kabupaten Grobogan Tahun 2014 disamping mengungkapkan keberhasilan juga mengungkapkan kegagalan dalam pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 : Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.						
Sasaran	Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja				
		Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)	
1.1	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi.	5	2	2	1	
1.2	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pertanian dalam arti luas.	3	2	1		
1.3	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana perdagangan.	2	1		1	
1.4	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pengembangan industri.	5	2	2		1
1.5	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.	2	2			



1.6	Meningkatnya ketersediaan pusat -pusat pembinaan kesehatan.	3	2	1		
1.7	Meningkatnya ketersediaan alat- alat pelayanan kesehatan.	7	7			
1.8	Meningkatnya ketersediaan pusat -pusat kegiatan pendidikan.	7	6			1
1.9	Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.	6	4		2	
1.10	Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.	1	1			
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			29	6	4	2
Rata – Rata Capaian Misi 1			Baik Sekali (119,762%)			
Misi 2 : Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
2.1	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.	1	1			
2.2	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.	3	3			
2.3	Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.	7	7			
2.4	Meningkatnya tingkat kebecerjaan lulusan pendidikan kejuruan.	1	1			
2.5	Meningkatnya perolehan jenjang akreditasi bagi satuan-satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD–SLTA dan lembaga pendidikan non formal.	1				1



2.6	Meningkatnya Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4.	1	1			
2.7	Meningkatnya Persentase guru yang telah tersertifikasi.	3	2	1		
2.8	Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.	5	5			
2.9	Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka.	1	1			
2.10	Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.	1	1			
2.11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm keg. olah raga.	1			1	
2.12	Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.	1			1	
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			22	1	2	1
Rata – Rata Capaian Misi 2			Baik Sekali (115,577%)			
Misi 3 : Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
3.1	Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.	1	1			
3.2	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.	1			1	
3.3	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	1			1	
3.4	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.	3	2		1	
3.5	Semakin minimalnya Persentase absensi para pekerja/ pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.	1	1			



3.6	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.	2	1			1
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			5	-	3	1
Rata – Rata Capaian Misi 3			Baik Sekali (106,075%)			
Misi 4 : Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
4.1	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.	8	7		1	
4.2	Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.	4	4			
4.3	Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.	2	2			
4.4	Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.	6	2	1	1	2
4.5	Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.	1				1
4.6	Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan berkembangnya usaha industri.	6	5	1		
4.7	Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.	3	2		1	
4.8	Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.	5	4			1
4.9	Meningkatnya dan berkembangnya kelembagaan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.	4	2	1		1
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			28	3	3	5
Rata – Rata Capaian Misi 4			Baik Sekali (147,181%)			



Misi 5 : Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
5.1	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.	4	4			
5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan program keluarga berencana.	8	4	1		3
5.3	Meningkatnya aktivitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.	2	2			
5.4	Meningkatkan kesetaraan gender	3	2			1
5.5	Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.	1				1
5.6	Meningkatnya keberhasilan menyelenggarakan pemilu 2015 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal.	1	1			
5.7	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.	4	3	1		
5.8	Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.	4	2	1	1	
5.9	Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum.	1				1
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			18	3	1	6
Rata – Rata Capaian Misi 5			Baik Sekali (88,21)			
Misi 6 : Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)



			(85%>)			
6.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.	4	3			1
6.2	Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan.	4	4			
6.3	Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.	2	1			1
6.4	Meningkatnya upaya reboisasi.	3	3			
6.5	Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.	1			1	
6.6	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.	6	4	1	1	
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			15	1	2	2
Rata – Rata Capaian Misi 6		Baik Sekali (170,171%)				
Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2015		Baik Sekali (124,496%)				
Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2014		Baik Sekali (111,009%)				

Secara umum Pemerintah Kabupaten Grobogan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016. Lima puluh dua Sasaran Strategis dalam RPJMD yang di dalamnya memiliki indikator kinerja sasaran / indikator kinerja utama sebanyak 163 (*seratus enam puluh tiga*) indikator dapat dicapai dengan rata-rata *sangat berhasil / baik sekali*.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas Pokok Dan Fungsi di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah terlaksana dengan baik dalam artian keseluruhan program – program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang ada pada Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang perlu menjadikan perhatian dan diharapkan kedepan akan lebih optimal kinerjanya dikarenakan ditemui kendala/hambatan.



Dari ke-lima puluh dua sasaran dengan 163 Indikator Kinerja Utama, 17 indikator mencerminkan pencapaian target dengan nilai kurang, 15 indikator mencerminkan pencapaian target dengan nilai cukup, 14 indikator mencerminkan pencapaian target dengan nilai baik, 117 indikator mencerminkan pencapaian target dengan nilai baik sekali. Secara akumulatif rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan mencapai 124,496%. Nilai tersebut jika diklasifikasikan dengan tingkatan keberhasilan, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 berpredikat baik sekali atau “sangat berhasil”.

Meski demikian akan selalu dilakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan sebagai bahan rujukan untuk perbaikan manajemen, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Grobogan di masa-masa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Kondisi Umum Daerah.....	1
1. Aspek Geografis.....	1
2. Aspek Demografi	5
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	12
4. Kondisi Ekonomi Daerah	21
5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	29
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	38
A. Perencanaan Kinerja	38
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016	38
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015	44
B. Perjanjian Kinerja.....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	66
B. Realisasi Anggaran	142
B.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	142
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.....	143
2. Target dan Realisasi Pendapatan	143
3. Permasalahan dan Solusi	143
B.2. Pengelolaan Belanja Daerah	147
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	147
2. Target dan Realisasi Belanja.....	149
3. Permasalahan dan Solusi	152
B.3. Pembiayaan Daerah	153
B.4. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2015	154
BAB IV PENUTUP	168
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah.....	3
Tabel I.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2014-2015.....	5
Tabel I.3	Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Sex Ratio Tahun 2015.....	5
Tabel I.4	Kepadatan Penduduk Tahun 2015	6
Tabel I.5	Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2015.....	8
Tabel I.6	Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2014.....	10
Tabel I.7	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015	10
Tabel I.8	APM dan APK Tahun 2011-2015	11
Tabel I.9	Kondisi Prasarana Gedung Sekolah Tahun 2011-2015.....	12
Tabel I.10	Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2011-2015.....	13
Tabel I.11	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.....	13
Tabel I.12	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 – 2015	14
Tabel I.13	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Grobogan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	15
Tabel I.14	Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan Tahun 2011-2015.....	15
Tabel I.15	Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015	16
Tabel I.16	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015	17
Tabel I.17	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015.....	22
Tabel I.18	Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010.....	22
Tabel I.19	Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010.....	23
Tabel I.20	Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015	25



Tabel I.21	PDRB Per Kapita Tahun 2011-2015.....	26
Tabel I.22	Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015.....	27
Tabel I.23	Perbandingan Angka Inflasi Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015	28
Tabel I.24	Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015.....	28
Tabel II.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2015.....	44
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2015.....	47
Tabel III.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Terhadap Target Tahun 2015.....	68
Tabel III.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Transportasi.....	74
Tabel III.2a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2011-2015.....	75
Tabel III.3	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Pertanian dalam Arti Luas	75
Tabel III.3a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2011-2015.....	76
Tabel III.4	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Perdagangan	77
Tabel III.4a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Tahun 2011-2015.....	78
Tabel III.5	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.4 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Pengembangan Industri.....	78
Tabel III.5a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.4 Tahun 2011-2015.....	79
Tabel III.6	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.5 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Pariwisata	80
Tabel III.6a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.5 Tahun 2011-2015.....	80
Tabel III.7	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.6 Meningkatnya Ketersediaan Pusat-Pusat Pembinaan Kesehatan	81
Tabel III.7a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.6 Tahun 2011-2015.....	82



Tabel III.8	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.7 Meningkatnya Ketersediaan Alat-Alat Pelayanan Kesehatan	82
Tabel III.8a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.7 Tahun 2011-2015.....	84
Tabel III.9	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.8 Meningkatnya Ketersediaan Pusat-Pusat Kegiatan Pendidikan	85
Tabel III.9a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.8 Tahun 2011-2015.....	86
Tabel III.10	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.9 Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penunjang Kegiatan Pendidikan.....	87
Tabel III.10a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.9 Tahun 2011-2015.....	88
Tabel III.11	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.10 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perbankan hingga Pedesaan	89
Tabel III.11a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.10 Tahun 2011-2015.....	90
Tabel III.12	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	90
Tabel III.12a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Tahun 2011-2015.....	90
Tabel III.13	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Menurunnya Angka Buta Aksara Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	90
Tabel III.13a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Tahun 2011-2015.....	91
Tabel III.14	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA	91
Tabel III.14a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Tahun 2011-2015.....	93
Tabel III.15	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.4 Meningkatnya Tingkat Kebekerjaan Lulusan Pendidikan Kejuruan.....	93
Tabel III.15a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.4 Tahun 2011-2015.....	94
Tabel III.16	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.5 Meningkatnya Perolehan Jenjang Akreditasi Bagi Satuan- .Satuan Pendidikan Baik di Negeri Maupun Swasta Pada Jenjang SD–SLTA dan Lembaga Pendidikan Non Formal	94



Tabel III.16a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.5 Tahun 2011-2015.....	95
Tabel III.17	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.6 Meningkatnya Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D4.....	95
Tabel III.17a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.6 Tahun 2011-2015.....	96
Tabel III.18	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.7 Meningkatnya Persentase Guru yang telah Tersertifikasi	96
Tabel III.18a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.7 Tahun 2011-2015.....	97
Tabel III.19	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.8 Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kependidikan Dalam Pengelolaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan.	97
Tabel III.19a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.8 Tahun 2011-2015.....	98
Tabel III.20	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.9 Meningkatnya Revitalisasi Organisasi Kepemudaan Dan Pramuka	99
Tabel III.20a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.9 Tahun 2011-2015.....	99
Tabel III.21	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.10 Meningkatnya Penguasaan Teknologi, Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas Pemuda.....	100
Tabel III.21a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.10 Tahun 2011-2015.....	100
Tabel III.22	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.11 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olah Raga	101
Tabel III.22a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.11 Tahun 2011-2015.....	101
Tabel III.23	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.12 Meningkatnya Prestasi Olah Raga di Tingkat Daerah, Provinsi, maupun Nasional.....	101
Tabel III.23a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2.12 Tahun 2011-2015.....	102
Tabel III.24	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya Umur Harapan Hidup Masyarakat ...	102
Tabel III.24a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Tahun 2011-2015.....	103
Tabel III.25	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	103



Tabel III.25a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Tahun 2011-2015.....	103
Tabel III.26	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	104
Tabel III.26a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Tahun 2011-2015.....	104
Tabel III.27	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita	104
Tabel III.27a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Tahun 2011-2015.....	105
Tabel III.28	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.5 Semakin Minimalnya Persentase Absensi para Pekerja/ Pegawai/ Aparat yang Disebabkan Gangguan Kesehatan	106
Tabel III.28a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3.5 Tahun 2011-2015.....	106
Tabel III.29	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.6 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular	107
Tabel III.29a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3.6 Tahun 2011-2015.....	108
Tabel III.30	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	108
Tabel III.30a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Tahun 2011-2015.....	109
Tabel III.31	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Meningkatnya Produksi Perkebunan. Kehutanan. Pternakan. dan Perikanan	110
Tabel III.31a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Tahun 2011-2015.....	110
Tabel III.32	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Meningkatnya Aset Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan. Hortikultura. Perkebunan. Kehutanan. Pternakan dan Perikanan	111
Tabel III.32a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Tahun 2011-2015.....	112
Tabel III.33	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.4 Meningkatnya Peran Penyuluh Pertanian dalam Upaya Peningkatan Produksi Pertanian	112
Tabel III.33a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4.4 Tahun 2011-2015.....	113



Tabel III.34	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.5 Meningkatnya Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan Hama serta Penyakit Tanaman.....	114
Tabel III.34a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4.5 Tahun 2011-2015.....	114
Tabel III.35	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.6 Meningkatnya Ketrampilan Usaha Industri dan Berkembangnya Usaha Industri	115
Tabel III.35a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4.6 Tahun 2011-2015.....	116
Tabel III.36	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.7 Meningkatnya dan Berkembangnya Usaha Perdagangan Masyarakat.....	117
Tabel III.36a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4.7 Tahun 2011-2015.....	118
Tabel III.37	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.8 Meningkatnya Usaha di Sektor Pariwisata	118
Tabel III.37a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4.8 Tahun 2011-2015.....	119
Tabel III.38	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.9 Meningkatnya dan Berkembangnya Kelembagaan Koperasi sebagai Wadah Aktifitas Ekonomi Masyarakat	120
Tabel III.38a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4.9 Tahun 2011-2015.....	121
Tabel III.39	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan.....	121
Tabel III.39a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Tahun 2011-2015.....	122
Tabel III.40	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Program Keluarga Berencana	123
Tabel III.40a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Tahun 2011-2015.....	125
Tabel III.41	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.3 Meningkatnya Aktivitas Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat.....	126
Tabel III.41a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5.3 Tahun 2011-2015.....	126
Tabel III.42	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.4 Meningkatkan Kesetaraan Gender	127
Tabel III.42a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5.4 Tahun 2011-2015.....	127



Tabel III.43	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.5 Meningkatnya Iklim Politik yang Kondusif Bagi Berkembangnya Kualitas Kebebasan Sipil dan Hak- Hak Politik Rakyat yang Semakin Seimbang dengan Peningkatan Kepatuhan Terhadap Hukum .	128
Tabel III.43a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5.5 Tahun 2011-2015.....	128
Tabel III.44	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.6 Meningkatnya Keberhasilan Menyelenggarakan Pemilu 2014 yang Demokratis. Rahasia dengan Tingkat Partisipasi Rakyat yang Optimal	128
Tabel III.44a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5.6 Tahun 2011-2015.....	129
Tabel III.45	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.7 Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi.	129
Tabel III.45a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5.7 Tahun 2011-2015.....	130
Tabel III.46	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.8 Meningkatnya Kepatuhan Semua Pihak terhadap Tegaknya Hukum yang Berlaku.....	131
Tabel III.46a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5.8 Tahun 2011-2015.....	132
Tabel III.47	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.9 Meningkatnya Kepercayaan dan Penghormatan Publik kepada Aparat dan Lembaga Penegak Hukum.....	132
Tabel III.47a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5.9 Tahun 2011-2015.....	133
Tabel III.48	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelestarian Lingkungan	133
Tabel III.48a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Tahun 2011-2015.....	134
Tabel III.49	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Meningkatnya Kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Terhadap Adanya Berbagai Jenis Limbah dan Pencemaran Lingkungan.....	135
Tabel III.49a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Tahun 2011-2015.....	136
Tabel III.50	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.3 Terciptanya Keresasian antara Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	137
Tabel III.50a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6.3 Tahun 2011-2015.....	138



Tabel III.51	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.4 Meningkatnya Upaya Reboisasi	138
Tabel III.51a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6.4 Tahun 2011-2015.....	139
Tabel III.52	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.5 Meningkatnya Ketersediaan Air Tanah/ Sumber Air.....	139
Tabel III.52a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6.5 Tahun 2011-2015.....	140
Tabel III.53	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.6 Meningkatnya Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam.....	140
Tabel III.53a	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6.6 Tahun 2011-2015.....	141
Tabel III.54	Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015	144
Tabel III.55	Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015.....	150
Tabel III.56	Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015.....	153
Tabel III.57	Realisasi Anggaran yang digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2015	155



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah	2
Gambar I.2	Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2015.....	8
Gambar I.3	Grafik Penduduk menurut kelompok Umur Tahun 2015.....	9
Gambar I.4	Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk	11
Gambar I.5	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan	22
Gambar I.6	Grafik Perkembangan Pendapatan Per Kapita Tahun 2011-2015.....	27
Gambar I.7	Bagan Pola Hubungan Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.....	36
Gambar III.1	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015	144
Gambar III.2	Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah Tahun 2015.....	146
Gambar III.3	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah	150
Gambar III.4	Komposisi Belanja Daerah Tahun 2015	151



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

B. 1. Aspek Geografis

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², membentang dari arah barat ke timur sepanjang ± 83 km dan dari utara ke selatan ± 37 km. Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.



Tabel I.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH DUSUN/LINGK	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	Kedungjati	12	76	130,342
2	Karangrayung	19	100	140,595
3	Penawangan	20	71	74,177
4	Toroh	16	118	119,320
5	Geyer	13	102	196,192
6	Pulokulon	13	112	133,644
7	Kradenan	14	79	107,748
8	Gabus	14	87	165,365
9	Ngaringan	12	78	116,720
10	Wirosari	14	86	154,298
11	Tawangharjo	10	58	83,602
12	Grobogan	12	52	104,556
13	Purwodadi	17	104	77,656
14	Brati	9	51	54,891
15	Klambu	9	44	46,562
16	Godong	28	86	86,780
17	Gubug	21	62	71,119
18	Tegowanu	18	54	51,670
19	Tanggunharjo	9	31	60,628
Jumlah		280	1.451	1.975,86

Sumber : Bag.Tata Pemerintahan Setda Kab.Grobogan, 2016

Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan seluas 197.586 Ha terdiri dari tanah sawah, bukan sawah dan lahan bukan pertanian dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah sawah seluas 66.184 Ha terdiri dari:
 - 1) Irigasi : 29.881 Ha
 - 2) Tadah Hujan : 36.303 Ha
- b. Tanah bukan sawah seluas 44.129 Ha terdiri dari :
 - 1) Sementara tidak diusahakan : 0 Ha
 - 2) Tegalan/Kebun : 23.917 Ha
 - 3) Ladang/huma : 0 Ha



- 4) Perkebunan : 87 Ha
 - 5) Hutan Rakyat : 4.160 Ha
 - 6) Padang Rumput : 0 Ha
 - 7) Lain-lain : 71.510 Ha
- c. Tanah Lahan bukan pertanian seluas 31.728 Ha

Kabupaten Grobogan dibagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut rata-rata (*mean sea level*) dengan kemiringan antara 0 – 8°. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- b. Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan antara 8-15° dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- c. Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut, rata-rata dengan kemiringan tanah di atas 15°, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan memiliki sumber bahan tambang dan galian yang cukup dapat diandalkan, meskipun sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga saat ini masih relatif kecil. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala seperti cara penambangan, cara pengolahan hasil dan sumber daya manusianya. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan terbukanya kesempatan bagi pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya guna mengelola bahan tambang dan galian secara optimal.

Bahan tambang/galian yang dimiliki dan mungkin dapat dikembangkan di Kabupaten Grobogan meliputi : kapur, tanah liat, garam, gips, batu dan lain-lain.



B. 2. Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Grobogan pada akhir tahun 2015 berjumlah 1.431.535 jiwa. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2014 sebesar 1.412.325 jiwa, maka terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 19.210 jiwa dengan demikian angka pertumbuhan penduduk sebesar 1,36%. Perkembangan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2014 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel I.2 berikut:

Tabel I. 2
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2014-2015

No.	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERTUMBUHAN (%)
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN		
1	2014	713.077	699.248	1.412.325	0,68
2	2015	718.225	713.310	1.431.535	1,36

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2016.

Jika dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan lebih besar berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 718.225 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 713.310 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Sementara itu jika dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, maka Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 132.460 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 37.275 jiwa. Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel I.3 berikut :

Tabel I.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Sex Ratio Tahun 2015

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		L	P	TOTAL	
1	KEDUNGJATI	23.543	23.307	46.850	101
2	KARANGRAYUNG	50.301	49.733	100.043	101



3	PENAWANGAN	33.284	33.537	66.821	99
4	TOROH	59.692	60.045	119.737	99
5	GEYER	34.251	34.366	68.617	100
6	PULOKULON	53.422	52.130	105.552	102
7	KRADENAN	40.719	40.165	80.884	101
8	GABUS	36.983	36.467	73.450	101
9	NGARINGAN	34.075	33.244	67.319	102
10	WIROSARI	45.104	44.856	89.960	101
11	TAWANGHARJO	28.547	27.860	56.407	102
12	GROBOGAN	37.395	36.863	74.258	101
13	PURWODADI	66.043	66.417	132.460	99
14	BRATI	24.724	24.369	49.093	101
15	KLAMBU	18.846	18.429	37.275	102
16	GODONG	42.319	42.695	85.014	99
17	GUBUG	40.677	40.579	81.256	100
18	TEGOWANU	27.535	27.356	54.891	101
19	TANGGUNGHARJO	20.756	20.892	41.648	99
	JUMLAH	718.225	713.310	1.431.535	101

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 2015 terlihat dalam Tabel I.4 dibawah ini :

Tabel I.4
Kepadatan Penduduk Tahun 2015

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN (Jiwa/KM2)
1	Kedungjati	130,342	46.850	359
2	Karangrayung	140,595	100.043	712
3	Penawangan	74,177	66.821	901
4	Toroh	119,320	119.737	1.003
5	Geyer	196,192	68.617	350
6	Pulokulon	133,644	105.552	790

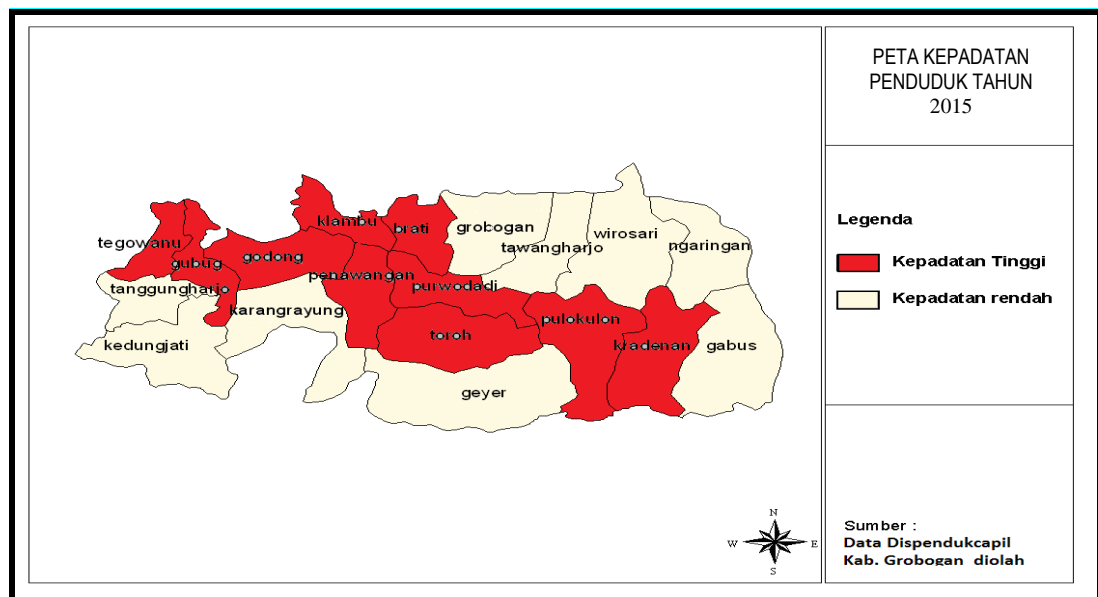


7	Kradenan	107,748	80.884	751
8	Gabus	165,365	73.450	444
9	Ngaringan	116,720	67.319	577
10	Wirosari	154,298	89.960	583
11	Tawangharjo	83,602	56.407	675
12	Grobogan	104,556	74.258	710
13	Purwodadi	77,656	132.460	1.706
14	Brati	54,891	49.093	894
15	Klambu	46,562	37.275	801
16	Godong	86,780	85.014	980
17	Gubug	71,119	81.256	1.143
18	Tegowanu	51,670	54.891	1.062
19	Tanggunharjo	60,628	41.648	687
	JUMLAH	1.975,865	1.431.535	725

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa Kecamatan Purwodadi memiliki tingkat kepadatan tertinggi sebesar 1.706 Jiwa/Km². Hal ini wajar karena Purwodadi merupakan Ibukota Kabupaten Grobogan. Sementara kecamatan yang masuk dalam kategori kepadatan tinggi karena memiliki tingkat kepadatan lebih tinggi dari kepadatan Kabupaten adalah Kecamatan Pulokulon, Penawangan, Toroh, Kradenan, Klambu, Godong, Gubug, Brati, Grobogan dan Tegowanu. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai angka kepadatan rendah, karena memiliki tingkat kepadatan lebih rendah dibanding kepadatan Kabupaten adalah kecamatan Geyer, Kedungjati, Karangrayung, Ngaringan, Gabus, Wirosari, Tawangharjo, dan Tanggunharjo.

Berikut peta kepadatan penduduk Kabupaten Grobogan, sebagaimana gambar I.2 sebagai berikut :



Gambar I.2
Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2015

Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I. 5
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2015

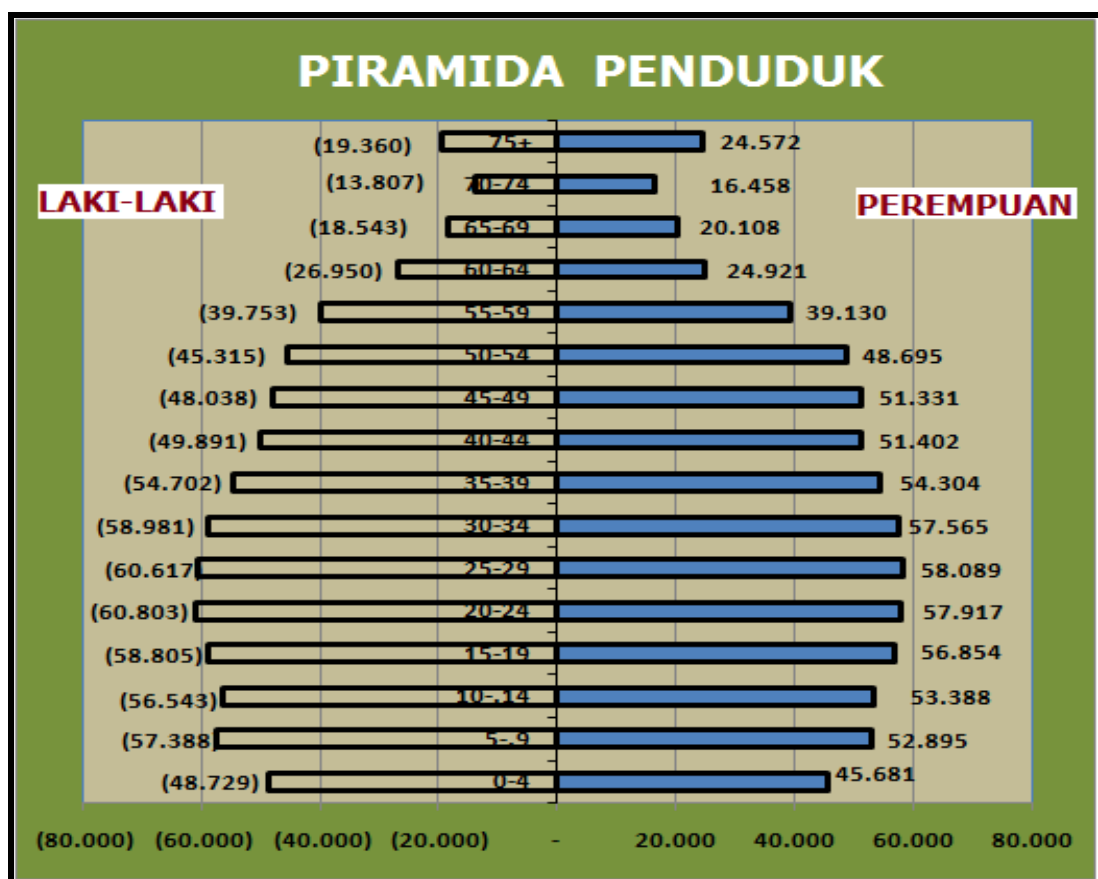
No.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	0-4	94.410
2	5-9	110.283
3	10-14	109.931
4	15-19	115.659
5	20-24	118.720
6	25-29	118.706
7	30-34	116.546
8	35-39	109.006
9	40-44	101.293
10	45-49	99.369
11	50-54	94.010
12	55-59	78.883
13	60-64	51.871
14	65-69	38.651



15	70-74	30.265
16	75 +	43.932
	TOTAL	1.431.535

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

Dari data diatas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar I.5 sebagai berikut :



Gambar. I.3
Grafik Penduduk menurut kelompok Umur Tahun 2015

Dari piramida penduduk diatas dapat diketahui angka ketergantungan penduduknya. Rasio Ketergantungan (Defendancy Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).



Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-65 tahun), karena mencapai 1.004.261 jiwa atau 71,1 %, kemudian kelompok usia bukan produktif (usia 0-15 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 408.064 jiwa atau 28,89%, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 41%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 41 orang yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi.

Sementara untuk angka pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2011 sampai akhir tahun 2015, mengalami tren penurunan, selengkapnya dilihat dalam tabel I.6 sebagai berikut:

Tabel I.6
Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2014

NO	TAHUN	JUMLAH ANGKATAN KERJA	JUMLAH PENYERAPAN	YANG BELUM TERSERAP	PREDIKSI PENGANGGURAN (%)
1	2011	731,572	693,556	38,016	5.20
2	2012	778,813	745,068	33,745	4.33
3	2013	755,761	710,014	45,747	6.05
4	2014	751,484	719,573	31,911	4.25
5	2015	723.069	685.333	37.736	5,22%

Sumber : Dinas Sosnakertrans, 2016

Kondisi pendidikan penduduk dapat dilihat dalam tabel jumlah penduduk menurut pendidikan tahun 2015, sebagai berikut :

Tabel I.7
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015

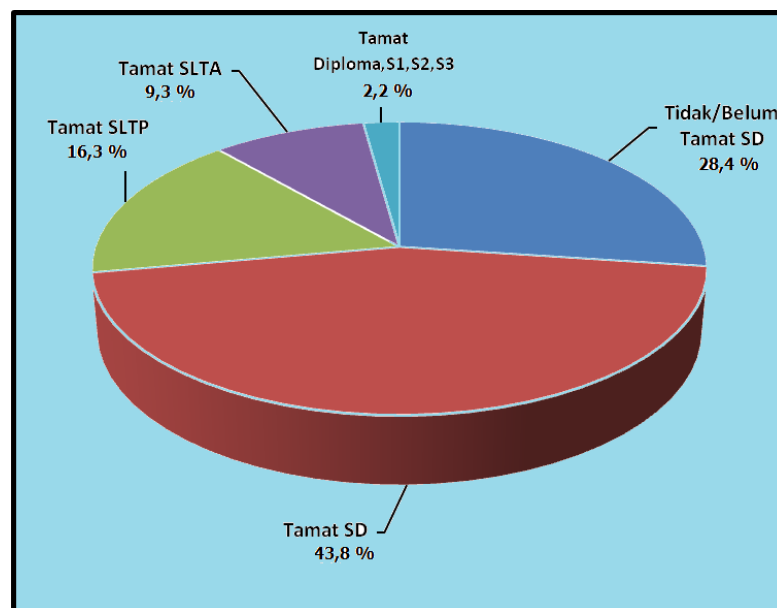
No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak/Belum Tamat SD	406.640
2	Tamat SD	627.892
3	Tamat SLTP	232.933
4	Tamat SLTA	132.880
5	Tamat Diploma , S1, S2, S3	31.190



TOTAL	1.431.535
--------------	------------------

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.

Dari data di atas, komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggi ditempati kategori tamatan SD atau sederajat sebanyak 43,8%, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 28,4%, tamatan SLTP atau sederajat 16,3%, tamatan SLTA atau sederajat 9,3%, dan terakhir tamatan Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2,2%. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditunjukkan dalam gambar I.4 berikut:



Gambar I.4
Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui kinerja bidang pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.8 berikut:

Tabel I.8
APM dan APK Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikatif				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	APK SD	102,56	103,08	115,41	112,06	106,65
2.	APM SD	89,35	95,09	95,15	96,56	97,69
3.	APK SLTP	97,60	98,55	99,46	107,09	100,03
4.	APM SLTP	86,87	90,59	80,74	84,05	87,06
5.	APK SLTA	28,92	47,32	56,70	63,79	67,35
6.	APM SLTA	26,68	33,87	33,93	41,02	51,72

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Grobogan

Usia sekolah SD : 7-12 tahun, SLTP :13-15 tahun, SLTA :16-18 tahun.

Dari tabel I.9 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Pada tahun 2015, nilai APM SD sebesar 97,69. Ini mengandung makna bahwa sebanyak 97,69 persen anak umur 7 sampai 12 tahun di Kabupaten Grobogan sedang memperoleh pendidikan di tingkat SD. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi ini menunjukkan perbaikan.
2. Nilai APM SLTP sebesar 87,06, artinya sebanyak 87,06 persen anak usia 13-15 tahun sedang mengenyam pendidikan SLTP.
3. Nilai APM SLTA sebesar 51,72 artinya sebanyak 51,72 persen anak 16-18 tahun sedang melangsungkan pendidikan di tingkat SLTA.

Selanjutnya kondisi prasarana pendidikan gedung sekolah, dapat dilihat dalam tabel I.9 sebagai berikut :

Tabel I.9
Kondisi Prasarana Gedung Sekolah tahun 2011-2015

NO	TAHUN	SD			SLTP			SLTA		
		RB	RR	B	RB	RR	B	RB	RR	B
1	2011	1.519	371	2.375	77	70	1.566	4	55	519
2	2012	1.765	1.354	1.711	47	110	366	21	76	640
3	2013	1.466	1.276	2.546	109	261	1.557	20	132	712
4	2014	683	2.931	1.269	200	958	446	41	150	740
5	2015	291	2.790	1.205	156	915	362	17	629	396

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2016

RB: Rusak Berat, RR : Rusak Ringan, B : Bagus

B. 3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Di Kabupaten Grobogan berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 17,36% pada tahun 2011 dan berurutan mengalami penurunan 16,13%, 14,87%, dan pada akhir tahun 2014 13,86. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel I.11 sebagai berikut :



Tabel I.10
Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2011-2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Miskin %	17,38	16,13	14,87	13,86	-

Sumber : BPS Kab. Grobogan. (data tahun 2015 belum tersedia)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data Tahun 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 2,37 atau berada di atas rata-rata angka nasional sebesar 1,90. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Ukuran ini memberikan informasi saling melengkapi pada kasus kemiskinan. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013 sebesar 0,59 atau lebih tinggi dari rata-rata angka nasional sebesar 0,49.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir cukup efektif. Perbandingan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan antara Kabupaten Grobogan dengan kabupaten-kabupaten tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel I.11 sebagai berikut :

Tabel I.11
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Kode	Kabupaten /Kota	2014				Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)
		Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	
09 3309	Kab. Boyolali	118,58	12,36	2,07	0,48	255.391
14 3314	Kab. Sragen	130,28	14,87	2,09	0,44	255.550
15 3315	Kab. Grobogan	186,53	13,86	1,94	0,45	290.827
16 3316	Kab. Blora	115,98	13,66	2,10	0,50	248.903
18 3318	Kab. Pati	148,05	12,06	1,61	0,35	332.228
19 3319	Kab. Kudus	65,80	7,99	0,69	0,10	314.211



21	3321	Kab. Demak	161,95	14,60	1,92	0,40	315.570
22	3322	Kab. Semarang	79,76	8,05	0,81	0,15	275.612
		JAWA TENGAH	4.561,83	13,58	2,09	0,51	281.570

Ketr : P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan
P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

b. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.12
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 – 2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai IPM Kabupaten	65,41	66,39	67,43	67,77	-
Nilai IPM Provinsi	66,64	67,21	68,02	68,78	-
Peringkat Kabupaten Dalam Provinsi	20	19	19	19	-

Sumber : BPS Kab. Grobogan. (data tahun 2015 belum tersedia)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 adalah sebesar 67,77. Angka ini termasuk dalam kelas pembangunan manusia kategori SEDANG. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun-tahun sebelumnya, IPM di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel I.13
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Grobogan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan	IPM
1	2	3	4	5	6	7



1	Kab. Semarang	72,90	94,59	8,07	643.839	75,48
2	Kab. Pati	73,05	89,56	7,04	655.687	74,58
3	Kab. Kudus	69,83	94,16	8,49	645.145	72,60
4	Kab. Demak	71,95	93,00	7,62	638.225	73,85
5	Kab. Sragen	73,05	84,49	7,34	637.914	72,31
6	Kab. Grobogan	70,45	91,78	6,86	640.930	72,37
7	Kab. Boyolali	70,71	88,12	7,46	637.534	71,88
8	Provinsi Jawa Tengah	71,97	91,71	7,43	646.438	74,05

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

c. Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan

Upaya meningkatkan mutu pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana keagamaan berupa rumah ibadah. Berikut ini data prasarana ibadah dan sosial keagamaan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 sampai tahun 2015, sebagaimana Tabel I.14 berikut:

Tabel I.14
Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan Tahun 2011-2015

No	Jenis Tempat Ibadah dan Sosial	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Masjid	1.335	1.345	1.345	1.345	1.345
2	Mushola	1.146	1.712	1.712	1.712	1.712
3	Langgar/Surau	4.223	4.608	4.608	4.608	4.608
4	Gereja	114	114	111	111	111
5	Pura/Kuil/Vihara	19	19	18	18	18
6	P. Sosial Asuhan Anak	28	28	28	28	28
7	P. Sosial Tresna Werda	1	1	1	1	1
8	Panti Orang Gila	1	1	1	1	1
9	Panti Persinggahan	1	1	1	1	1
10	Panti Cacat	1	1	1	1	1

Sumber data : Bagian Kesra Setda Kab. Grobogan



d. Kesehatan

Perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menyeluruh yang dekat dengan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tahun 2015 secara rinci seperti pada tabel 1.15 berikut :

Tabel I.15
Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Rumah Sakit	7	7	-	-
2.	Puskesmas	30	14	4	12
2.	Puskesmas Pembantu	69	26	26	17
3.	Klinik	22	22	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Grobogan.

Adapun indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diukur dengan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Prevalensi Gizi Buruk Balita. Perkembangan AKB, AKI, AKBA, dan prevalensi gizi buruk pada balita tahun 2011 sampai tahun 2015 seperti pada tabel 1.16 berikut :

Tabel I.16
Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikatif				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	AKB/1000 KH	8,78	10,60	14,14	17,82	17,44
2.	AKI/100.000 KH	114,03	150,12	101,10	188,69	149,92
3.	AKABA/1000 KH	9,12	11,61	15,72	19,53	18,99
4.	PREVALENSI GIZI BURUK BALITA	0,03	0,03	0,05	0,06	0,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Grobogan.

Angka kematian bayi (AKB) merupakan banyaknya kematian bayi umur kurang dari 1 tahun (0–11 bulan) per 1.000 kelahiran



hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan tabel I.16, AKB di Kabupaten Grobogan tahun 2015 sebesar 17,44/1.000 kelahiran hidup (KH) dan bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 17,82/1.000 KH, AKB mengalami penurunan. Secara nasional sesuai target sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2011-2015 yaitu 24 per 1.000 KH, AKB di Kabupaten Grobogan masih di bawah angka tersebut. Walaupun telah menunjukkan penurunan, namun bila dibandingkan dengan Indikator Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan sebesar 9,1/1.000 KH, Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut, demikian juga untuk target RAD MDGs Kabupaten Grobogan 2011-2015 maupun indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang masing-masing menargetkan sebesar 8,5/1.000 KH pada tahun 2015.

Angka kematian ibu (AKI) dihitung semasa kehamilan, persalinan dan masa nifas yang mempunyai manfaat sebagai gambaran risiko dihadapi oleh ibu selama kehamilan dan melahirkan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetrik. Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi. Angka kematian ibu di Kabupaten Grobogan tahun 2015 sebesar 149,92/100.000 kelahiran hidup (KH) dan bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 188,69/100.000 KH, angka tersebut juga menunjukkan penurunan. Namun apabila dibandingkan dengan target MDGs ke-5 tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 dan target Provinsi Jawa Tengah sebesar 60/100.000 KH, Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut.

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah kematian anak balita (12 – 59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat



keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan. Angka kematian balita di Kabupaten Grobogan tahun 2015 sebesar 18,99/1.000 KH, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 19,53/1.000 KH, artinya AKABA di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target MDGs ke-4 tahun 2015 yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup, AKABA di Kabupaten Grobogan masih sesuai target, namun bila dibandingkan RAD MDGs Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,01/1.000 KH, RAD MDGs Kabupaten Grobogan dan indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2015 yang masing-masing 9,3/1.000 KH, Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut, walaupun AKABA telah mengalami penurunan.

Permasalahan AKI, AKB dan AKABA di Kabupaten Grobogan memerlukan usaha keras dan dukungan semua pihak untuk menurunkannya. Upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :

- 1). Kebijakan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebagai upaya menjamin persalinan dikelola oleh tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten dengan ditunjang sarana prasarana yang memadai termasuk kesiapan sistem rujukan. Kebijakan yang cukup tegas ini memberikan inspirasi kepada Kementerian Kesehatan RI, sehingga Dinas Kesehatan kabupaten Grobogan telah 2 (dua) kali didaulat menjadi nara sumber pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
- 2). Pemantauan kinerja klinis untuk pelayanan ibu dan bayi baru lahir pada 10 (sepuluh) Puskesmas dengan dukungan Program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) untuk memotivasi agar peralatan dan pelayanan yang diberikan sesuai standar.
- 3). *Short Massage Service* (SMS) bunda yaitu layanan sms ke nomor 08118469468 yang secara berkala memberikan pesan kepada ibu dan keluarganya tentang kehamilan dan pasca persalinan serta bayi dan anak umur usia 2 tahun. Sejak diluncurkan pada Bulan Agustus 2015, Kabupaten Grobogan mempunyai cakupan tertinggi se- Indonesia.
- 4). Menambah bidan baru untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kebidanan khususnya pada desa yang sulit akses pelayanan kesehatannya.



- 5). Meningkatkan ketrampilan teknis kebidanan dan bayi baru lahir bagi dokter pada 30 Puskesmas dan dokter fasilitas pelayanan kebidanan swasta dengan mendapat dukungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Grobogan.
- 6). Meningkatkan ketrampilan bidan dalam pelayanan kebidanan dan neonatus yang didukung oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Grobogan dan IDI.
- 7). Bimbingan teknis fokus pada peningkatan cakupan pelayanan kehamilan, persalinan dengan partograf dan ibu nifas termasuk bayi baru lahir dengan Manajemen Terpadu bayi Muda (MTBM) pada 30 Puskesmas.
- 8). Penyediaan peralatan pelayanan kehamilan, persalinan, dan nifas serta bayi baru lahir secara mandiri oleh Puskesmas dengan menggunakan dana JKN (Jaminan Kesehatan nasional) pada 30 Puskesmas. Disamping itu juga mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan melalui bantuan paket bidan kit sebanyak 146 paket.
- 9). Rehab pembangunan ruang bersalin di Puskesmas menggunakan dana APBD Kabupaten Grobogan pada 5 (lima) Puskesmas.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dan telah menunjukkan hasilnya ini akan terus ditingkatkan pada tahun 2016 yang akan datang. Disamping upaya-upaya yang telah berjalan tersebut, upaya baru yang akan dikembangkan diantaranya :

- 1). Rehab pembangunan ruang bersalin di Puskesmas menggunakan dana APBD Kabupaten Grobogan sebanyak 12 (dua belas) Puskesmas.
- 2). Peningkatan kapasitas Puskesmas dalam pelayanan kebidanan, persalinan dan pelayanan bayi baru lahir dengan membangun Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergensi Dasar sebanyak 5 (lima) Puskesmas dengan dukungan dana APBN.
- 3). Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) untuk mempersiapkan ibu dua hari sebelum melahirkan dan tiga hari perawatan setelah melahirkan bagi 6.320 ibu hamil, rujukan bagi 5.820 ibu hamil risiko tinggi dan 500 ibu hamil di desa terpencil.
- 4). Pengembangan jejaring dengan *Centre of Indonesia's Strategic Initiative* (CISID) yaitu suatu lembaga swadaya masyarakat yang



fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pendampingan pada tiga Puskesmas selama tiga tahun.

Selanjutnya pendataan gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada 2 kategori, kategori pertama membandingkan berat badan dengan umurnya (BB/U) dan kategori kedua membandingkan berat badan dengan tinggi badannya (BB/TB).

Skrining pertama dilakukan di Posyandu dengan kategori pertama yaitu membandingkan berat badan dengan umurnya melalui kegiatan penimbangan. Jika ditemukan kasus gizi kurang/buruk dilakukan perawatan gizi kurang/buruk sesuai pedoman di Posyandu dan Puskesmas, dilanjutkan dengan skrining berikutnya yaitu dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badannya, jika ternyata menderita gizi buruk maka dilakukan perawatan sesuai standar sampai di Rumah Sakit.

Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi kenaikan. Pada tahun 2014 prevalensi gizi buruk sebesar 0,06% dan pada tahun 2015 sebesar 0,05% yang menunjukkan penurunan. Prevalensi gizi buruk tahun 2015 bila dibandingkan dengan RAD MDGs Kabupaten Grobogan dan Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2015 sebesar < 5% masih sesuai target.

B. 4. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Potensi Daerah

Produk unggulan adalah produk yang mempunyai keunggulan dari segi produksi, kontinuitas dan daya saing sehingga diterima oleh masyarakat dan menarik investor. Sesuai kondisi geografis/potensi wilayah yang ada, produk unggulan di Kabupaten Grobogan adalah : padi, jagung, kedelai, dan batu kapur, mebel serta genteng press.

Selain produk unggulan Kabupaten Grobogan juga memiliki produk andalan yaitu produk yang dapat diandalkan oleh suatu daerah karena banyak diusahakan oleh masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang cerah, diantaranya adalah : sapi bibit, sale pisang, melon merah, kecap, paha katak, sarang burung walet dan kerajinan alat pertanian.

b. Pertumbuhan PDRB



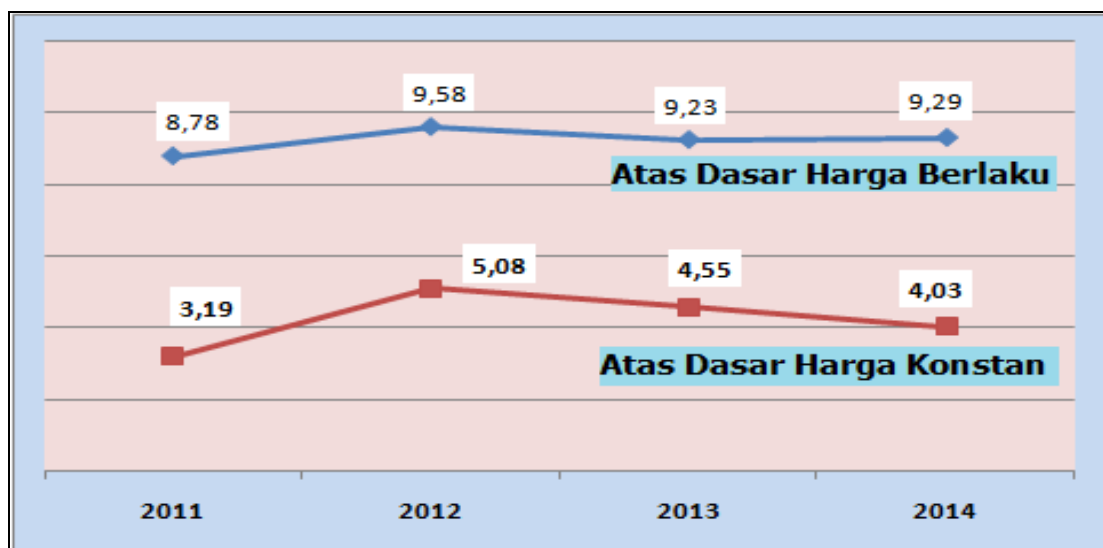
Secara makro, Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang bersumber dari berbagai sektor lapangan usaha di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Itu artinya perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2015 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,07 dan atas dasar harga konstan sebesar 4,24. Hal ini ditunjukkan dari angka pertumbuhan PDRB, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana terlihat dalam Tabel I.17 dan Gambar I.5 sebagai berikut :

Tabel I.17
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

PDRB	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Atas Dasar Harga Berlaku	8,78	9,58	9,23	9,29	
Atas Dasar Harga Konstan	3,19	5,08	4,55	4,03	

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia)



Gambar. I.5

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan

c. Pertumbuhan Sektoral terhadap PDRB

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2011 sampai dengan 2015 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel I.18 sebagai berikut :

Tabel I.18
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,64	4,53	1,78	0,10	
2	Pertambangan dan Penggalian	7,61	14,04	8,00	5,27	
3	Industri Pengolahan	7,82	6,65	7,79	7,74	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,12	9,37	8,90	0,96	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,66	-1,24	2,21	4,65	
6	Konstruksi	3,22	6,44	6,59	5,07	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,44	3,92	4,48	4,05	
8	Transportasi dan Pergudangan	7,63	7,26	7,49	7,69	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,12	2,90	1,89	6,44	
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,83	7,75	10,19	



No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,69	4,72	6,39	7,32	
12	Real Estate	6,85	6,31	9,13	5,80	
13	Jasa Perusahaan	4,48	5,24	5,70	5,86	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,02	0,65	2,96	1,11	
15	Jasa Pendidikan	13,26	12,31	7,47	6,79	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,43	5,22	3,68	5,48	
17	Jasa lainnya	4,23	1,76	7,49	8,08	
	PDRB	3,19	5,08	4,55	4,03	

Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).

d. Perkembangan PDRB

Secara sektoral, perkembangan PDRB Atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel I.19 dan I.20 sebagai berikut :

Tabel I.19
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN (Rp dalam jutaan)				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.229.095,65	4.420.863,13	4.499.335,70	4.503.752,85	
2	Pertambangan dan Penggalian	135.896,43	154.980,80	167.384,78	176.199,50	
3	Industri Pengolahan	1.342.086,60	1.431.366,15	1.542.864,73	1.662.217,60	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12.437,85	13.603,07	14.813,60	14.956,19	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.967,21	6.880,77	7.032,63	7.359,51	
6	Konstruksi	709.486,32	755.160,38	804.908,83	845.723,83	
7	Perdagangan	2.893.418,44	3.006.953,63	3.141.785,87	3.269.107,53	



No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN (Rp dalam jutaan)				
		2011	2012	2013	2014	2015*
	Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
8	Transportasi dan Pergudangan	615.530,07	660.218,03	709.686,48	764.286,68	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	597.676,04	615.007,85	626.623,07	666.959,99	
10	Informasi dan Komunikasi	322.918,38	348.212,54	375.216,21	413.465,48	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	481.751,05	504.465,72	536.722,88	576.002,05	
12	Real Estate	291.013,27	309.365,92	337.597,87	357.185,23	
13	Jasa Perusahaan	30.742,50	32.352,13	34.194,86	36.198,37	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	504.348,50	507.617,38	522.630,87	528.432,22	
15	Jasa Pendidikan	509.897,58	572.649,79	615.423,66	657.206,72	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123.774,50	130.235,87	135.033,46	142.437,11	
17	Jasa lainnya	365.671,55	372.113,97	399.973,44	432.271,50	
	PDRB	13.172.711,96	13.842.047,14	14.471.228,93	15.053.762,36	

Sumber : BPS Kab.Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).

Tabel I.20
Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2015

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN (Rp dalam jutaan)				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	Pertanian, Kehutanan,	4.509.988,95	5.000.614,76	5.446.273,45	5.751.016,30	



No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN (Rp dalam jutaan)				
		2011	2012	2013	2014	2015*
	dan Perikanan					
2	Pertambangan dan Penggalian	143.864,24	165.662,69	184.416,99	220.353,99	
3	Industri Pengolahan	1.479.083,33	1.619.849,27	1.785.792,88	2.062.929,38	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12.562,55	13.497,74	14.004,57	14.218,96	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.232,30	7.541,91	8.481,08	9.410,32	
6	Konstruksi	743.582,63	825.363,16	911.045,21	1.031.137,08	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.989.125,74	3.167.011,34	3.408.388,66	3.643.079,36	
8	Transportasi dan Pergudangan	616.771,00	664.486,63	722.417,16	828.064,18	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	620.807,74	658.282,50	706.464,56	794.495,97	
10	Informasi dan Komunikasi	327.383,52	344.948,00	363.504,00	390.624,57	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	509.149,51	581.561,40	647.811,84	731.061,52	
12	Real Estate	293.812,89	316.746,47	350.127,31	386.123,88	
13	Jasa Perusahaan	32.684,78	35.613,71	39.465,91	43.233,89	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	513.448,30	570.981,16	615.639,31	661.956,08	
15	Jasa Pendidikan	577.044,07	707.321,20	822.946,56	919.721,82	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133.115,23	150.961,79	164.640,77	181.371,78	
17	Jasa lainnya	376.984,84	386.986,58	430.067,33	496.047,15	
	PDRB	13.886.641,62	15.217.430,31	16.621.487,57	18.164.846,24	

Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).



e. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan, tahun 2015 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel I.21 sebagai berikut :

Tabel I. 21
PDRB Per Kapita Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah penduduk Hasil Proyeksi	PDRB (Juta Rp.)		PDRB Perkapita (Rp.)	
			harga berlaku	harga konstan 2010	harga berlaku	harga konstan 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	2011	1.319.775	13.886.641,62	13.172.711,96	10.521.977	9.981.029
2	2012	1.328.197	15.217.430,31	13.842.047,14	11.457.209	10.421.682
3	2013	1.336.304	16.621.487,57	14.471.228,93	12.438.403	10.829.294
4	2014	1.343.960	18.164.846,24	15.053.762,36	13.515.913	11.201.049
5	2015*)	-	-	-	-	-

Sumber :BPS Kab .Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).

Sesuai tabel di atas terlihat data pertumbuhan PDRB perkapita Tahun 2014 atas dasar Harga Konstan sebesar Rp. 11.201.049,- atau naik 3,43% dari tahun sebelumnya. Sedangkan atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 13.515.913,- atau naik sebesar 8,66%. Pergerakan kenaikan pendapatan per kapita ini dapat dilihat pada gambar I.6 sebagai berikut :



Gambar I.6
Grafik Perkembangan Pendapatan Per Kapita Tahun 2011-2015

f. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi yang terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 1,86 sedangkan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,03. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagai berikut :

Tabel I.22
Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi	1,86	4,48	7,88	8,03	3,31

Sumber :BPS Kab. Grobogan.

Tabel I.23
Perbandingan Angka Inflasi Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Kode	KABUPATEN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
3315	Grobogan	1.86	4.48	7.88	8.03	3,31
3309	Boyolali	3.35	3.45	8.21	7.45	2,58



3314	Sragen	2.86	3.74	7.55	7.11	
3316	Blora	2.26	3.55	7.94	7.13	2,85
3318	Pati	2.30	3.92	7.57	8.01	3,23
3319	Kudus	3.34	4.77	8.31	8.59	3,28
3321	Demak	3.49	4.10	8.22	8.69	2,81
3322	Semarang	3.29	4.56	8.11	8.63	2,85
3300	Prov. Jawa Tengah	2.68	4.24	7.99	8.22	2,73

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2015 merupakan angka sangat sementara)

g. Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari indikator nilai Indeks Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah (Kriteria Bank Dunia). Berdasarkan kriteria tersebut, maka kondisi pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel I.24
Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015*)	Keterangan
1.	Indeks Gini Ratio	0,32	0,35	0,34	0,34	-	Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena di bawah batas ketimpangan (<0,35)
2.	Prosentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah	21,8 4%	18,9 1%	21,3 8%	21,3 4%	-	Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena di atas batas ketimpangan (>17%)

Sumber :BPS Kab. Grobogan (data tahun 2015 belum tersedia).

Berdasarkan data pada Tabel I.24, di atas dapat diketahui bahwa pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan berada pada kategori ketimpangan rendah yang ditunjukkan dari indikator Angka Indeks Gini Ratio selama empat tahun berturut-turut selalu berada di bawah angka 0,35.



Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah selama empat tahun berturut-turut menerima lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten yakni mulai tahun 2011 sebesar 21,84%, tahun 2012 sebesar 18,91%, tahun 2013 sebesar 21,38% serta tahun 2014 sebesar 21,34%.

B. 5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan sejak dilaksanakan otonomi daerah Tahun 1999 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tentang penataan organisasi perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, dan guna menghindari tumpang tindih tugas pokok dan fungsi organisasi maka pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya pada Tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan



Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Sehingga saat ini Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. Terdiri dari :
 - 3.1. Dinas Pendidikan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pendidikan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan sejumlah 19 (sembilan belas) UPTD yang berada di setiap kecamatan dan 1 (satu) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pendidikan.
 - 3.2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah 7 (tujuh) UPTD yang berada di 6 (enam) wilayah eks Pembantu Bupati dan 1 (satu) UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.
 - 3.3. Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan terdiri dari 30 (tiga puluh)



- UPTD Puskesmas, 1 (satu) UPTD Gudang Farmasi, 1 (satu) UPTD Laboratorium Kesehatan dan 1 (satu) UPTD Pra Badan Pelayanan Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kesehatan.
- 3.4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) UPTD Transito dan 1 (satu) UPTD Balai Latihan Kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 3.5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, informatika dan komunikasi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terdiri dari 3 (tiga) UPTD Terminal dan 1 (satu) UPTD Perparkiran untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
 - 3.6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 19 (sembilan belas) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di setiap kecamatan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - 3.7. Dinas Bina Marga, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum bina marga sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum bina marga. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Bina Marga terdiri dari 6 (enam) UPTD Bina Marga Wilayah, 1 (satu) UPTD Workshop, dan 1 (satu) UPTD Laboratorium Konstruksi untuk melaksanakan kegiatan teknis



- operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pekerjaan umum bina marga.
- 3.8. Dinas Pengairan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum pengairan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum pengairan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengairan terdiri dari 6 (enam) UPTD Pengairan di tiap wilayah eks Pembantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pengairan.
 - 3.9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang koperasi, usaha, kecil dan menengah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan koperasi, usaha, kecil dan menengah.
 - 3.10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sumberdaya mineral sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sumberdaya mineral. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari 7 (tujuh) UPTD Pasar Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Pasar Daerah.
 - 3.11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari 19 (sembilan belas) UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan, 1 (satu) UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 1 (satu) UPTD Laboratorium Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - 3.12. Dinas Peternakan dan Perikanan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian khusus peternakan dan perikanan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian khusus peternakan dan perikanan. Unsur pelaksana teknis pada



- Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) UPTD Peternakan dan Perikanan, 1 (satu) UPTD Rumah Potong Hewan, dan 2 (dua) UPTD Balai Benih Ikan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pertanian khusus peternakan dan perikanan.
- 3.13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kehutanan dan bidang pertanian khusus perkebunan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kehutanan dan pertanian khusus perkebunan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari 6 (enam) UPTD Kehutanan dan Perkebunan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kehutanan dan bidang pertanian khusus perkebunan.
- 3.14. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum bidang cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum khusus cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari 6 (enam) UPTD Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, 1 (satu) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, 1 (satu) UPTD Work Shop, 1 (satu) UPTD Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pekerjaan umum bidang cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- 3.15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari 6 (enam) UPTD Pengelola



Pendapatan Daerah di 6 (enam) wilayah eks-Pembantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang urusan administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

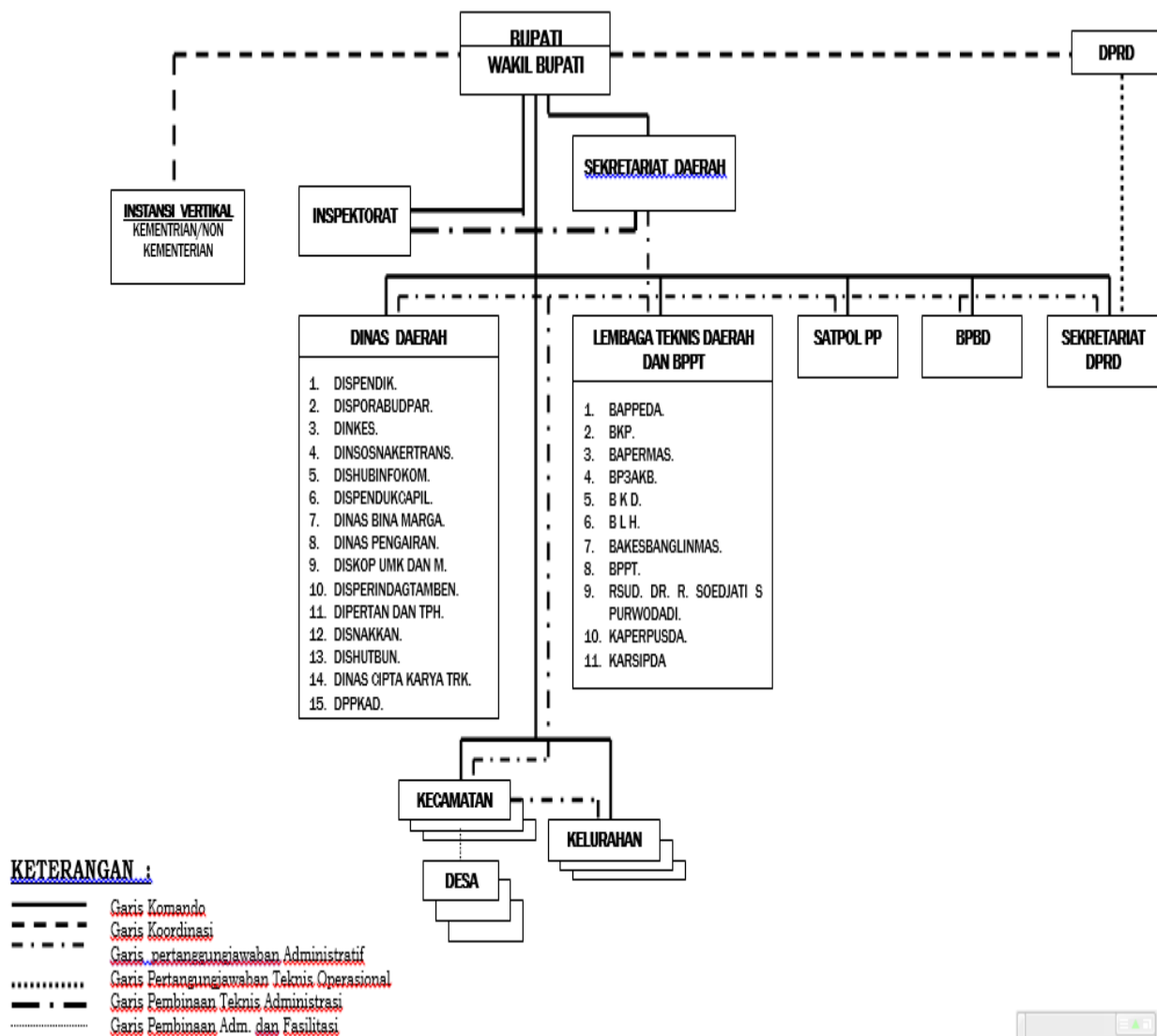
4. Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati, terdiri dari Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Perangkat Daerah lain yang berbentuk Badan dan atau Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
 - 4.1. Inspektorat, adalah unsur pengawas yang merupakan badan pengawasan daerah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 4.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta di bidang penelitian dan pengembangan.
 - 4.3. Badan Ketahanan Pangan, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan. Unsur pelaksana pada Badan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) UPTB Lumbung Cadangan Pangan yang melaksanakan urusan dan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan.
 - 4.4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
 - 4.5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Unsur pelaksana pada Badan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari 19 (sembilan belas) UPTB Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan yang melaksanakan urusan dan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - 4.6. Badan Kepegawaian Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan



- pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 4.7. Badan Lingkungan Hidup, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 - 4.8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
 - 4.9. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
 - 4.10. Kantor Perpustakaan Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas di bidang perpustakaan daerah.
 - 4.11. Kantor Arsip Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas di bidang arsip daerah.
 - 4.12. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perijinan secara terpadu dan penanaman modal.
 - 4.13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah perangkat daerah Kabupaten Grobogan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Kecamatan, Kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan berjumlah 19 (sembilan belas) yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 6. Kelurahan, Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan berjumlah 7 (tujuh), yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.



Adapun Bagan Pola Organisasi dan Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal dan antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Gambar I.7 sebagai berikut :



Gambar I.7
Bagan Pola Hubungan Kerja
Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan



Saat ini (akhir Desember 2015), Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 10.555 orang pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jabatan struktural sebanyak 1.240 jabatan, yang terdiri dari :
 - a. Jabatan Eselon IIA sebanyak 1 jabatan (terisi);
 - b. Jabatan Eselon IIB sebanyak 35 jabatan (terisi);
 - c. Jabatan Eselon IIIA sebanyak 68 jabatan (terisi 67, kosong 1);
 - d. Jabatan Eselon IIIB sebanyak 117 jabatan (terisi 114, kosong 3);
 - e. Jabatan Eselon IVA sebanyak 665 jabatan (terisi 604, kosong 61);
 - f. Jabatan Eselon IVB sebanyak 274 jabatan (terisi 150, kosong 124);
 - g. Jabatan Eselon VA sebanyak 66 jabatan (terisi 59, kosong 7).
2. Pejabat Fungsional Khusus sebanyak 7218 orang, yang terdiri dari :
 - a. Fungsional Guru sebanyak 5.954 orang;
 - b. Fungsional non Guru sebanyak 1.467 orang, yang terdiri dari :
 - 1) Apoteker : 11 orang;
 - 2) Asisten Apoteker : 37 orang;
 - 3) Auditor : 4 orang;
 - 4) Bidan : 296 orang;
 - 5) Dokter : 54 orang;
 - 6) Dokter Gigi : 8 orang;
 - 7) Fisioterapis : 9 orang;
 - 8) Nutrisionis : 26 orang;
 - 9) Pamong Belajar : 24 orang;
 - 10) Pekerja Sosial : 7 orang;
 - 11) Pengantar Kerja : 2 orang;
 - 12) Pengawas Sekolah : 107 orang;
 - 13) Pengawas Pemerintahan : 7 orang;
 - 14) Penggerak Swadaya Masyarakat : 1 orang;
 - 15) Penilik : 37 orang;
 - 16) Penyuluh KB : 73 orang;
 - 17) Penyuluh Kehutanan : 23 orang;
 - 18) Penyuluh Kesehatan Masyarakat : 2 orang;
 - 19) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan : 1 orang;
 - 20) Penyuluh Pertanian : 69 orang;
 - 21) Perawat : 343 orang;
 - 22) Perawat Gigi : 31 orang;
 - 23) Perekam Medis : 14 orang;
 - 24) Pranata Laboratorium : 40 orang;
 - 25) Radiografer : 14 orang;
 - 26) Sanitarian : 25 orang;
 - 27) Teknisi Elektromedis : 5 orang.
 - c. Pejabat Fungsional Umum (staf) sebanyak 2.105 orang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA.

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011-2016

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Grobogan pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, maka untuk pembangunan Kabupaten Grobogan pada periode tahun 2011-2016, disusun visi sebagai berikut:

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera."

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa Kabupaten Grobogan diupayakan agar memiliki kemajuan pesat dan keunggulan di bidang industri pengolahan produk pertanian yang dihasilkan oleh daerah Grobogan itu sendiri dan diupayakan pula menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan dari hasil pertanian tersebut.
- b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- c. Sedangkan yang dimaksud masyarakat Grobogan yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai kecukupan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan lahir (sandang, pangan, papan) maupun kebutuhan bathin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram).



MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

Tujuan dan Sasaran

- **Untuk mencapai misi 1**, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana ekonomi, dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi.
 - Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pertanian dalam arti luas.
 - Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana perdagangan.



- Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pengembangan industri.
- Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat pelayanan kesehatan.
 - Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan.
- Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana pembangunan pendidikan dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan.
 - Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana bidang pemerintahan dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.
- **Untuk mencapai misi 2**, maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.
 - Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.
 - Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.
 - Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya tingkat ke bekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.



- Meningkatnya perolehan jenjang akreditasi bagi satuan-satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD - SLTA dan lembaga pendidikan non formal.
- Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, dan tenaga kependidikan dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4.
 - Meningkatnya prosentase guru yang telah bersertifikasi.
 - Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.
- Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka.
 - Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.
- Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga pada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.
 - Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.
- **Untuk mencapai misi 3**, maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
 - Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.
 - Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.
 - Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
 - Meningkatkan optimalisasi kesehatan para pekerja/ pegawai/ aparat dan masyarakat dengan sasaran antara lain:



- Semakin minimalnya prosentase absensi para pekerja/ pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
- Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
- **Untuk mencapai misi 4**, maka tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
 - Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
 - Meningkatkan upaya pemberdayaan para penyuluh pertanian dalam arti luas dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.
 - Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.
 - Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan para pelaku usaha industri, perdagangan, dan pariwisata dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan berkembangnya usaha industri.
 - Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
 - Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.
 - Meningkatkan dan berkembangnya kelembagaan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.
- **Untuk mencapai misi 5**, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.



- Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana.
- Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
- Dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- Meningkatkan kualitas demokratisasi di daerah dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.
 - Meningkatnya keberhasilan menyelenggarakan pemilu 2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal.
- Meningkatkan iklim transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
 - Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
 - Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum.
- **Untuk mencapai misi 6**, maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
 - Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan.
 - Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya
 - Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya upaya reboisasi.
 - Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.



- o Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

2. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

Prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2015 yang tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2015 terdiri dari sepuluh prioritas. Perincian prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015 dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi2. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas3. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri5. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pariwisata
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya ketrampilan usaha industri danberkembangnya usaha industri2. Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat3. Meningkatnya usaha di sektor pariwisata4. Meningkatkan dan berkembangnya kelembagaan koperasisebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat5. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga7. Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan2. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	<ol style="list-style-type: none">3. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat4. Dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender5. Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.2. Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan3. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya4. Meningkatnya upaya reboisasi5. Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.6. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita5. Semakin minimalnya prosentase absensi para pekerja/pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan6. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular7. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat pelayanan kesehatan8. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan
6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka
7. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas3. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
untuk semua.	sampaidengan SLTA 4. Meningkatnya tingkat keberkerjaan lulusan pendidikan kejuruan. 5. Meningkatnya perolehan jenjang akreditasi bagi satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD - SLTA dan lembaga pendidikan non formal. 6. Meningkatnya prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 7. Meningkatnya prosentase guru yang telah bersertifikasi 8. Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan 9. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan 10. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan
8. Peningkatan kesadaran hukum.	1. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi 2. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.	1. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum 2. Meningkatnya keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal 3. Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum
10. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas	1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 2. Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan 3. Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. 4. Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian 5. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman

Sumber : RKPD Kab. Grobogan Tahun 2015



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Misi 1 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Daerah, Seperti Jalan, Jembatan, Pengairan, Pusat – Pusat Pendidikan, dan Pusat – Pusat Pembinaan Kesehatan serta Infrastruktur Strategis Lainnya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.1	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi.	Panjang jalan (km)	883,10
		Persentase panjang jalan kondisi baik (%)	42,96
		Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)	60,30
		Persentase jembatan kondisi baik (%)	77,58
		Persentase kendaraan yang layak jalan (%)	100
1.2	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pertanian dalam arti luas.	Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%)	53,60
		Persentase embung kondisi baik (%)	67
		Persentase waduk kondisi baik (%)	67
1.3	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana perdagangan.	Jumlah pasar tradisional kondisi baik	13
		Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha	5
1.4	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pengembangan industri.	Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha (%)	75
		Pertumbuhan PDRB ADHK (pertumbuhan ekonomi) (%)	5,90-6,40
		Laju inflasi (%)	4-10



		Indeks Gini	0,25
		Rata-rata waktu penyelesaian 1 (satu) jenis perijinan	3 jam
1.5	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.	Jumlah restoran dan rumah makan (unit)	45
		Jumlah penginapan/hotel	10
1.6	Meningkatnya ketersediaan pusat - pusat pembinaan kesehatan.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	80
		Persentase Posyandu aktif (%)	100
		Persentase PKK aktif (%)	100
1.7	Meningkatnya ketersediaan alat- alat pelayanan kesehatan.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)	100
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100
		Cakupan pelayanan nifas (%)	100
		Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani (%)	90
		Cakupan kunjungan bayi (%)	90
1.8	Meningkatnya ketersediaan pusat - pusat kegiatan pendidikan.	% TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri	74
		% lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	94
		% pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	80
		% lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik	45
		% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik	100



		% SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik	100
		% SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik	100
1.9	Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.	% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	50
		% SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer	18
		% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	60
		% SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan komputer	70
		% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	95
		% SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	70
1.10	Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.	Jenis dan Jumlah Bank dan cabang (unit)	34
Misi 2 : Memantapkan Pembangunan di Bidang Pendidikan untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia agar Memiliki Kecerdasan dan Daya Saing yang Lebih Baik.			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
2.1	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,9
2.2	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.	Angka Melek Huruf (%)	100
		Persentase penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis (orang)	100
		Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun (orang)	0



2.3	Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.	APK PAUD (%)	70
		APK SD/MI (%)	102,7
		APK SMP/MTs (%)	88,90
		APK SMA/SMK/MA (%)	57,9
		APM SD/MI (%)	98,2
		APM SMP/MTs (%)	98
		APM SMA/SMK/MA (%)	60
2.4	Meningkatnya tingkat ke bekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.	Persentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya (%)	20
2.5	Meningkatnya perolehan jenjang akreditasi bagi satuan-satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD–SLTA dan lembaga pendidikan non formal.	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah RSBI (unit)	100
2.6	Meningkatnya Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 (%)	80,54
2.7	Meningkatnya Persentase guru yang telah tersertifikasi.	Persentase guru SD yang bersertifikasi (%)	100
		Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi (%)	38
		Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi (%)	49
2.8	Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.	Persentase guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan (%)	80
		Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional (%)	42
		Persentase guru SD/MI layak mengajar (%)	90
		Persentase guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan (%)	93
		Persentase guru SMA/SMK/MA layak mengajar (%)	100



2.9	Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka.	Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%)	50,6
2.10	Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.	Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok)	109
2.11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm keg. olah raga.	Jumlah pemuda berprestasi (orang)	100
2.12	Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.	Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang)	101,0
Misi 3 : Memantapkan Pembangunan di Bidang Kesehatan untuk Mendorong Derajat Kesehatan Masyarakat agar dapat Bekerja secara Lebih Optimal dan Memiliki Harapan Hidup yang Lebih Panjang.			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
3.1	Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,50
3.2	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	106,20
3.3	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12,5
3.4	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	13,2
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100
		Persentase gizi buruk (%)	0,05
3.5	Semakin minimalnya Persentase absensi para pekerja/ pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%)	35



3.6	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	70
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100
Misi 4 : Memantapkan Pembangunan Ekonomi dengan Mendorong Semakin Tumbuh dan Berkembangnya Pembangunan di Bidang Pertanian dalam Arti Luas, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4.1	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.	Produksi pertanian tanaman pangan utama :	
		- Padi	704.569
		- Jagung	751.586
		- Kedelai	80.650
		- Kacang Hijau	25.305
		Produksi pertanian tanaman hortikultura utama :	
		- Mangga	14.874
		- Cabe Merah	1.116
4.2	Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.	- Melon	6.995
		- Semangka	17.907
		Populasi produksi komoditas perkebunan utama :	
		- Kelapa	2600
		- Tebu rakyat	1808
		Populasi produksi komoditas peternakan utama :	
- Sapi potong	206.816		
		- Kambing	111.144



4.3	Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.	Jumlah produksi perikanan budidaya (kg)	1.760.836
		Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)	13,59
4.4	Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.	Jumlah Penyuluh Pertanian (orang)	165
		Jumlah Penyuluh Peternakan (orang)	64
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Pemula	320
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Lanjut	585
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	668
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama	97
4.5	Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.	Jumlah Penyuluh Pertanian (PHP/ Pengamat Hama dan Penyakit) (orang)	51
4.6	Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan berkembangnya usaha industri.	Nilai produksi industri besar/ sedang (ribu rupiah)	328.733.969
		Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah)	239.470.583
		Nilai produksi industri rumah tangga (ribu rupiah)	433.944.754
		Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%)	70
		Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah)	8
		Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah)	24
4.7	Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.	Daya beli masyarakat (Ribu Rupiah)	1.000
		Nilai ekspor (US \$)	4.697.301
		Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina	200
4.8	Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	87.455
		Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan (unit)	3



		Jumlah pengeluaran belanja wisatawan :	
		- Wisatawan Nusantara (Rupiah)	150
		- Wisatawan Mancanegara (US \$)	75.000
		Jumlah kelompok sadar wisata (kelompok)	3
4.9	Meningkatnya dan berkembangnya kelembagaan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)	33.800
		Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha) (%)	30
		Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (%)	90
		Persentase koperasi aktif (%)	100
<p>Misi 5 : Memantapkan Upaya Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) Berdasarkan Demokratisasi, Transparansi, Penegakan Hukum, Berkeadilan, Kesetaraan Gender dan Mengutamakan Pelayanan kepada Masyarakat.</p>			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
5.1	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.	Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)	19
		Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	70
		Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)	95
		Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Grobogan (%)	90
5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan program keluarga berencana.	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI)	85
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)	3,61
		Cakupan PUS peserta KB anggota	96,25



		Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	30
		Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa)	1
		Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (orang/desa)	1 per 2 desa
		Jumlah PIK-KRR aktif (buah)	100
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	72
5.3	Meningkatnya aktivitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.	Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%)	50
		Jumlah Linmas (orang)	10.168
5.4	Meningkatkan kesetaraan gender	Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS)(%)	50
		Persentase Perempuan dalam lembaga legislatif (%)	35
		Cakupan penerapan PPRG dan ARG lintas sektor	100
5.5	Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.	Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun	1
5.6	Meningkatnya keberhasilan menyelenggarakan pemilu 2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)	70,55
5.7	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.	Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif	140
		Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi	58



		Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet	58
		Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif	58
5.8	Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.	Jumlah kasus / konflik sengketa tanah milik negara yang terselesaikan	100
		Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)	.20
		Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus)	0
		Status Audit Keuangan Daerah	WTP
5.9	Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum.	Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus)	80
Misi 6 : Memantapkan Upaya Pelestarian Sumberdaya Alam dan Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang Mampu Memenuhi Kebutuhan dan Pemerataan Pembangunan Guna Meningkatkan Perekonomian.			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
6.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.	Jumlah penambangan tanpa ijin	197
		Jumlah relawan bencana kabupaten (orang)	301
		Persentase sampah yang terangkut (%)	9,5
		Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)	51
6.2	Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	40
		Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	100



		Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	40
		Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	40
6.3	Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya	Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%)	10
		Jumlah bangunan ber-IMB (unit)	550
6.4	Meningkatnya upaya reboisasi.	Luas lahan kritis (ha)	837,90
		Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)	25,12
		Luas hutan rakyat (ha)	17885
6.5	Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.	Persentase kerusakan kawasan hutan (%)	1,05
6.6	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	80
		Persentase rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%)	100
		Jumlah lumbung pangan	75
		Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)	53,15
		Luas wilayah banjir (ribu ha)	2,66
		Luas wilayah kekeringan (ribu ha)	0,42

ANGGARAN PROGRAM		
Pendidikan		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 1.037.000.000
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Rp 39.946.516.616
3	Program Pendidikan Menengah	Rp 16.998.092.000
4	Program Pendidikan Non Formal	Rp 2.058.400.000
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 8.085.900.000
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 3.433.892.000
7	Program Pendidikan Berkelanjutan	Rp 100.000.000
8	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rp 50.000.000
9	<i>Program Pendidikan Non Formal</i>	Rp. 1.330.000.000



Kesehatan		
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 179.759.000
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 74.344.978.260
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 75.000.000
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 510.000.000
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 175.000.000
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 1.313.000.000
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 400.000.000
8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp 2.215.000.000
9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp 305.000.000
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 75.000.000
11	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp 7.200.000.000
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp. 83.888.000.000
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 53.100.000
Pekerjaan Umum		
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 11.255.173.450
2	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong	Rp 9.743.000.000
3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 11.350.000.000
4	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Rp 53.131.744.563
5	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Rp 14.013.000.000
6	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 6.780.000.000
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp 700.000.000
8	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp 1.020.000.000
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa san Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 32.872.639.774
10	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp 2.390.000.000
11	Program Pengendalian Banjir	Rp 33.090.000.000
12	Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp 735.000.000
Perumahan		
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 7.855.416.000



Penataan Ruang		
1	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 300.000.000
2	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 975.000.000
Perencanaan Pembangunan		
1	Program Pengembangan Data/ Informasi	Rp 1.702.282.000
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2.860.000.000
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 1.510.000.000
4	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 1.085.000.000
5	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 150.000.000
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 590.000.000
Perhubungan		
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 550.000.000
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 430.000.000
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 404.000.000
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 575.000.000
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 30.000.000
Lingkungan Hidup		
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 4.430.000.000
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 587.300.000
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 525.000.000
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 230.000.000
5	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rp 40.000.000
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 78.200.000
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp 130.000.000
Pertanahan		
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 50.000.000



Kependudukan dan Catatan Sipil		
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 2.872.550.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 859.750.000
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 515.500.000
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 65.000.000
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp 165.000.000
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
1	Program Keluarga Berencana	Rp 2.782.205.000
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp 34.800.000
3	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp 109.436.000
4	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual, termasuk HIV/ AIDS	Rp 24.000.000
5	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp 102.000.000
6	Program Pengembangan Model Operasional Bina Keluarga Balita - Posyandu- PADU	Rp 226.450.000
Sosial		
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp 70.000.000
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 100.000.000
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp 15.000.000
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp 25.000.000
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Rp 20.000.000
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp 20.000.000
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 629.900.000
8	Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam	Rp 78.500.000
Ketenagakerjaan		
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 500.000.000
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 1.070.000.000



3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	427.000.000
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp	15.000.000
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	365.000.000
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	50.000.000
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	917.000.000
Penanaman Modal			
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	200.000.000
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	48.540.000
Kebudayaan			
1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	715.000.000
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	250.000.000
Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Rp	30.000.000
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp	310.000.000
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rp	640.000.000
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp	515.000.000
5	Program Pemberdayaan Lembaga/ Organisasi Kepemudaan	Rp	350.000.000
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	1.632.908.500
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	486.500.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp	70.200.000
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	80.000.000
5	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp	20.000.000
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp.	3.100.000



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Rp 1.671.174.000
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 7.534.246.500
3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 613.200.000
4	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp 150.000.000
5	Program Penataan Peraturan Perundang -Undangan	Rp 1.050.030.000
6	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 50.000.000
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 2.334.500.000
8	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Rp 46.500.000
9	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 3.666.061.000
10	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Rp 250.000.000
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	Rp 245.000.000
12	Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Rp 1.813.890.000
13	Program Penalaksanaan Pemerintah Daerah	Rp 85.000.000
14	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 936.030.000
15	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 185.000.000
16	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 10.000.000
17	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal Pedesaan	Rp 5.000.000
18	Program Penunjang Pelayanan Pendidikan	Rp 10.000.000
19	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 16.000.000
20	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 180.000.000
21	Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Rp. 10.000.000
22	Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 10.000.000
23	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Rp 235.000.000
24	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp 1.121.000.000
25	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp 686.000.000
26	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rp 400.000.000
27	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Rp 230.000.000



28	Program Pendukung Operasional Forum Terpadu Penanggulangan Bencana	Rp	25.000.000
Ketahanan Pangan			
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	5.410.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp	6.103.536.000
2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	1.014.000.000
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	128.100.000
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp.	3.171.080.000
5	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi, Perdesaan	Rp	610.000.000
6	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rp	82.000.000
7	Program Pengembangan Data	Rp	291.000.000
8	Program Pengentasan Kemiskinan	Rp	663.680.000
Kearsipan			
1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Rp	120.000.000
2	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Rp.	139.000.000
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rp	173.000.000
Komunikasi dan Informatika			
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	1.490.000.000
2	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rp	705.000.000
3	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rp	30.000.000
Perpustakaan			
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	385.800.000
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Bahan Pustaka	Rp	36.000.000
Pertanian			
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	1.433.375.000
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Rp	25.379.900.000
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	658.250.000
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/	Rp	495.000.000



	Perkebunan	
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp 2.535.000.000
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp 2.310.900.000
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp 11.122.700.000
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp 405.000.000
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp 3.466.500.000
Kehutanan		
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp 185.000.000
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp 2.126.792.000
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp 10.000.000
Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp 450.000.000
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp 35.000.000
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas	Rp. 180.000.000
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Potensi dan Teknologi Geologi	Rp. 110.000.000
Pariwisata		
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 230.000.000
2	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 370.000.000
Kelautan dan Perikanan		
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp 1.495.000.000
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp 250.000.000
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp 370.000.000
Perdagangan		
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 130.000.000
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 5.609.502.000
3	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Rp. 20.000.000
4	Program Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar	Rp 40.000.000
Industri		
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 925.000.000



2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	80.000.000
3	Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial	Rp	50.000.000
Ketransmigrasian			
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp	360.000.000
2	Program Transmigrasi Lokal	Rp	140.000.000
Jumlah / nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis organisasi			Rp. 568.445.479.663
Jumlah Anggaran Kab. Grobogan Tahun 2015			Rp. 702.512.327.000

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2015



BAB IV P E N U T U P

Dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditampilkan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Kebijakan Pemerintah Daerah** Tahun 2015, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2015. RKPD ini merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan prioritas pembangunan daerah, sebagai penjabaran dari visi misi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016.
2. Dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015, telah ditetapkan **Prioritas Pembangunan Daerah** Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :
 - a. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
 - b. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - d. Peningkatan pemerataan pembangunan.
 - e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - f. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
 - g. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua.
 - h. Peningkatan kesadaran hukum.
 - i. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
 - j. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas
3. APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014, sedangkan perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2015.
4. Secara ringkas, **realisasi pelaksanaan APBD** Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh BPK RI, adalah sebagai berikut :
 - a. **Pendapatan Daerah**
Target pendapatan daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.006.226.129.000,- terealisasi sebesar 100,49%, dengan



komposisi sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah 13,46%; Dana Perimbangan 58,83%; dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah 27,71%.

b. Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.223.149.637.431,- terealisasi sebesar 89,05%, dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar 60,79% dan Belanja Langsung 39,21%.

Untuk Belanja Tidak Langsung tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp.1.327.986.823.431,- terealisasi sebesar 90,63%, sedangkan Belanja Langsung tahun 2015 sebesar Rp. 895.162.814.000,- terealisasi sebesar 86,71%.

c. Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2015 Pembiayaan Netto dalam angka positif, sehingga dapat menutup defisit anggaran dan masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 255.456.466.530,-.

5. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

a. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan pekerjaan umum serta munculnya *conflict of interest* dalam penyusunan perencanaan kegiatan;
- 2) Keterbatasan kapasitas manajerial dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum, sehingga sulitnya pencapaian sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan urusan pekerjaan umum;
- 3) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum;
- 4) Masyarakat petani belum memahami kepemilikan bantaran sungai sehingga banyak digunakan untuk lahan pertanian dan perumahan;
- 5) Struktur tanah di Kabupaten Grobogan merupakan tanah lempung bersifat ekspansif dan berpotensi kembang susut yang sangat signifikan, sangat tidak cocok menjadi tanah dasar pembangunan dibidang pekerjaan umum, terutama



- pembangunan jalan karena CBR nya dibawah 3%, jauh dari persyaratan pembangunan jalan yang minimal 5%, sehingga untuk membuat konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanah tersebut diperlukan biaya yang sangat besar;
- 6) Sebagian besar bahan bangunan untuk konstruksi jalan didatangkan dari luar Kabupaten Grobogan, sehingga biaya bahan bangunan menjadi lebih besar;
 - 7) Terdapat 2 kegiatan konstruksi yang memiliki realisasi fisik sebesar 52 % , hal ini di sebabkan karena mutu pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, penyedia tidak mau memperbaiki sehingga di lakukan pemutusan kontrak;
 - 8) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pengguna jalan dalam mentaati peraturan lalu lintas sehingga sering mengakibatkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan;
 - 9) Banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan tetapi masih dioperasikan;
 - 10) Masih rendahnya pengetahuan awak/kru kendaraan angkutan umum tentang tata tertib berlalu lintas;
 - 11) Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan serta fasilitas lalu lintas seperti rambu-rambu, marka jalan, RPPJ, APILL, dan lainnya;
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan sarana prasarana pendidikan khususnya perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran dll sehingga mutu lulusannya masih rendah;
 - 2) Masih ada sekolah yang kondisi gedungnya memprihatinkan;
 - 3) Masih banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah atau terpaksa drop out karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan sekolah;
 - 4) Pencapaian Akseptor KB Pria (MOP dan Kondom) masih rendah;
 - 5) Pendapatan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera masih rendah;
 - 6) Pemahaman terhadap Isu Gender pada semua lapisan masyarakat masih rendah;
 - 7) Data Pilah Gender dalam program / kegiatan pada SKPD belum maksimal;



- 8) Masih kurangnya kebutuhan tenaga PNS untuk mendukung kinerja Dinas , mengingat jumlah PNS yang ada sekarang ini belum mencukupi sehingga perlu penambahan PNS;
 - 9) Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan presentatif yang mana Gedung Olah Raga belum maksimal dalam pengelolaannya;
 - 10) Masih Kurangnya pembinaan yang berjenjang pada atlet yang berprestasi;
 - 11) Masih kurangnya pembinaan pada pemuda agar mereka dapat berdikari sendiri dan rasa nasionalisme yang kurang.
- c. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Antara lain sebagai berikut :
1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA);
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat;
 3. Cakupan penimbangan balita (D/S) masih kurang dari target 80%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu sebagai salah satu UKBM masih kurang;
 4. Masih ditemukan peredaran makanan dan minuman di masyarakat yang belum berizin SPIRT yang dikeluarkan Pemda cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
 5. Penentuan kriteria masyarakat miskin untuk jamkesda tambahan belum mengacu pada ketentuan BP3AKB tentang kriteria miskin;
 6. Kurangnya peran Kepala Desa dalam membina FKD (Forum Kesehatan Desa) dalam upaya pembangunan Desa Siaga terutama penganggaran dari desa;
 7. Penanggulangan gizi buruk yang belum maksimal;
 8. Penggunaan garam beryodium ditingkat masyarakat belum maksimal;
 9. Pencapaian ASI Eksklusif masih kurang dari target 80%;
 10. Kasus penyakit menular pada remaja di Kabupaten Grobogan masih tinggi;
 11. Populasi jumlah Usila di Kabupaten Grobogan semakin bertambah/meningkat, namun program Usila belum program prioritas;
 12. Ketidak disiplin masyarakat dalam menggunakan kartu kepesertaan untuk berobat sehingga terjadi pengalokasian biaya kesehatan yang tidak seimbang akhirnya membebani Anggaran Daerah;
 13. Kurangnya Tenaga Medis dan Paramedis.



- d. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Masih kurangnya peraturan-peraturan yang mendukung penataan ruang wilayah;
 - 2) Perlunya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penataan ruang dan bangunan;
 - 3) Luasnya cakupan wilayah mengakibatkan tidak tersedianya database perencanaan pembangunan yang memadai;
 - 4) Masih kurangnya sinkronisasi antar SKPD bidang perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
 - 5) Terdapat 5 (lima) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya adalah :
 - Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang.
 - Kegiatan Penyusunan Peta Analog dan Peta Digital Rencana Tata Ruang (Luncuran 2014).
 - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
 - Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang, dengan realisasi fisik sebesar 0 % ;
 - Kegiatan Penyusunan pra survey Tahun 2015/ 2016, selama 12 bulan.
 - 6) Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan perumahan serta munculnya *conflict of interest* dalam penyusunan perencanaan kegiatan;
 - 7) Keterbatasan modal usaha petani / peternak;
 - 8) Ketersediaan pakan ternak baik kualitas maupun kuantitas terutama di musim kemarau masih menjadi kendala dalam meningkatkan produksi maupun produktifitas ternak;
 - 9) Masih rendahnya tingkat pemahaman petani peternak dan pembudidaya ikan dalam pengelolaan usaha ternak dan ikannya;
 - 10) Keterbatasan SDM tenaga teknis peternakan yang profesional;



- 11) Belum punya tenaga profesi dan peralatan penera UTTP di Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang UTTP;
- 12) Adanya rembesan peredaran barang dari daerah lain yang masuk wilayah Kabupaten Grobogan yang tidak sesuai dengan peraturan tata niaganya;
- 13) Fluktuasi harga yang terjadi di masyarakat terutama pada saat menghadapi Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru;
- 14) Pedagang belum memahami hak dan kewajiban berkaitan dengan izin pemakaian tempat dan pada UPTD Pasar Daerah belum ada petugas yang khusus mengurus pasar;
- 15) Belum ada kesepakatan dengan pedagang unggas berkaitan dengan relokasi pasar;
- 16) Lesunya pemasaran produk makanan olahan;
- 17) Pengrajin masih kesulitan dalam pembuatan desain batik;
- 18) Terbatasnya ketrampilan pengrajin kulit;
- 19) Terbatasnya ketrampilan pengrajin olahan produk industri jagung;
- 20) Ketrampilan pengrajin tenun masih rendah;
- 21) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan industri olahan abon dari bahan baku ikan lele;
- 22) Terbatasnya mesin peralatan produksi industri olahan abon lele;
- 23) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pengrajin susu, yoghurt berbahan baku kedelai;
- 24) Terbatasnya mesin peralatan produksi industri susu, yoghurt;
- 25) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan industri olahan aneka buah dan sayuran;
- 26) Terbatasnya mesin Vacuum Drying aneka buah dan sayuran;
- 27) Terbatasnya contoh desain batik bagi sentra-sentra KUB batik;
- 28) Terbatasnya modal, sarana dan prasarana untuk mendukung proses produksi di dalam pengelolaan perikanan;
- 29) Masih kurangnya tingkat pengetahuan petani nelayan dalam hal teknologi budidaya ikan;
- 30) Sebagian besar usaha perikanan di Kabupaten Grobogan merupakan kolam tadah hujan sehingga sangat dipengaruhi oleh musim;



- 31) Masih rendahnya penerapan teknologi perikanan terutama dalam penanganan pasca panen produk perikanan (Tekhnologi pengolahan produk perikanan);
 - 32) Kesulitan dalam pemasaran produksi hasil perikanan;
 - 33) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata di semua obyek wisata di Kabupaten Grobogan dikarenakan penanganan dan pengelolaan yang masih kurang optimal dan infrastruktur jalan yang kurang mendukung;
 - 34) Masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar obyek wisata yang masuk dalam kelompok sadar wisata dalam ikut mengelola dan memelihara kebersihan dalam obyek wisata;
 - 35) Masih kurangnya kesempatan untuk melaksanakan promosi pariwisata didalam dan diluar daerah Kabupaten Grobogan, dikarenakan sulitnya mengkoordinasi para seniman daerah, masih minimnya macam kesenian daerah yang dapat menunjang pariwisata dan mahalnnya stand pameran;
 - 36) Investor luar kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata di kabupaten Grobogan;
 - 37) Masih Kurangnya minat masyarakat Grobogan akan kesenian daerah;
 - 38) Masih kurangnya mengenalkan seni budaya asli Grobogan;
 - 39) Upacara tradisional di Kabupaten Grobogan mulai banyak di tinggalkan;
 - 40) Kurang berkembangnya organisasi seni tradisional di kabupaten Grobogan karena kelengkapan organisasi kurang memadai dan alat kesenian juga kurang.
- e. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Masih kurangnya pemahaman pengurus barang terhadap pedoman pengelolaan barang daerah;
 - 2) Masih kurangnya tenaga pemeriksa/pejabat fungsional yang meliputi Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan sebanyak 20 (duapuluh) orang dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi, Hukum, Teknik dan Apoteker. Hal ini disebabkan obyek pemeriksaan ke depan semakin kompleks dan beban tugas diluar pemeriksaan semakin banyak;
 - 3) Masih terbatasnya anggaran yang diberikan, khususnya guna meningkatkan kinerja Aparat Pengawas



- Internal Pemerintah (APIP), perlu adanya tambahan penghasilan guna kesejahteraan pegawai;
- 4) Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2015 yaitu : Kegiatan Pelatihan Damage and Loss Assessment (DALA);
 - 5) Masih kurangnya peralatan sarana dan prasarana kearsipan dan depo arsip;
 - 6) Kesulitan kurangnya tenaga / pegawai PNS yang membina dan mengolah arsip terutama jabatan fungsional yaitu arsiparis;
 - 7) Kurang optimalnya penanganan pelanggaran Perda, di sebabkan belum optimalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang membidangi penyidikan pelanggaran Perda, serta koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kurang maksimal;
 - 8) Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mentaati peraturan daerah di dalam menciptakan suasana yang tertib dan aman;
 - 9) Banyaknya bermunculan usaha tempat hiburan cafe karaoke yang tidak berijin;
 - 10) Masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu sangat penting dan apabila membutuhkan baru mencari.
- f. Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Keterbatasan kapasitas manajerial dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum, sehingga sulitnya pencapaian sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan urusan pekerjaan umum;
 - 2) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum;
 - 3) Pertambangan tanpa ijin dilakukan oleh masyarakat di beberapa kecamatan;
 - 4) Pemeliharaan bantuan PLTS belum dapat dilakukan karena tidak ada teknisi di SKPD.
 - 5) Desa/Kelurahan yang ada pangkalan LPG 3 Kg baru berjumlah 63,5 % dari seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Grobogan;
 - 6) Perubahan jumlah lokasi kegiatan dan referensi bahan dari konsultan;



- 7) Semakin maraknya pemanfaatan air tanah untuk usaha oleh masyarakat;
 - 8) Rendahnya penganggaran para petugas kebersihan jauh di bawah UMR sehingga tidak maksimal dalam memberikan beban kerja;
 - 9) Frekuensi pekerjaan yang tidak stabil menyulitkan dalam perhitungan kebutuhan;
 - 10) Pelaku usaha masih belum tertib dalam pelaporan pengelolaan lingkungan;
 - 11) Banyaknya kader lingkungan tingkat kecamatan yang tidak dilibatkan dalam kegiatan LH sehingga sosialisasi pengelolaan LH di tingkat daerah kurang;
 - 12) Masih kurangnya koordinasi dengan stake holder/dinas instansi terkait;
 - 13) Kesadaran masyarakat akan keteduhan dan kebersihan di Kota Purwodadi masih rendah, kurangnya himbauan/slogan tentang kebersihan dan keteduhan;
 - 14) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemilahan sampah.
6. Solusi-solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Diusulkan penambahan jumlah SDM / staf teknis untuk pengelolaan urusan pekerjaan umum;
 - 2) Fasilitasi Kegiatan Peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan pekerjaan umum;
 - 3) Diusulkan penambahan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum;
 - 4) Pembinaan kelompok tani dan memanfaatkan setiap forum yang ada untuk menyadarkan petani dan masyarakat sekitar tentang fungsi dan manfaat dari bantaran sungai;
 - 5) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani pemakai Air) tentang tata pola tanam yang tepat dalam skala yang luas;



- 6) Solusi yang telah dilakukan untuk menangani kondisi tanah yang tidak mendukung telah diterapkan konstruksi beton;
 - 7) Sedangkan untuk menangani banyaknya panjang jalan yang rusak telah dilaksanakan prioritas penanganan Kegiatan Peningkatan atau pemeliharaan jalan dengan prioritas utama pada jalur trayek, jalan kabupaten dan jalan desa. Dengan konstruksi ini diharapkan umur konstruksi jalan minimal 10 tahun dengan konsekuensi biaya yang mahal dibandingkan dengan konstruksi ATB;
 - 8) Pada pekerjaan tidak selesai dan mengalami putus kontrak maka pekerjaan di bayar sesuai dengan capaian fisik dilapangan dan penyedia di masukan ke dalam daftar hitam, serta pekerjaan yang baru satu sisi segera di usulkan kembali penanganannya di tahun anggaran berikutnya;
 - 9) Memperbaiki dan mencermati kembali dalam proses usulan maupun perencanaan, sehingga tidak terjadi kegiatan yang batal di laksanakan ataupun pemindahan lokasi pekerjaan;
 - 10) Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa / lelang untuk kegiatan agar pelaksanaan pekerjaan dapat di mulai lebih awal;
 - 11) Melaksanakan optimalisasi dan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan Pemda dan berusaha mengajukan tambahan anggaran sehingga secara bertahap dapat mewujudkan tercapainya SPM;
 - 12) Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat/pengguna jalan khususnya pemilik kendaraan tentang pentingnya mentaati peraturan / tata tertib berlalu lintas;
 - 13) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan operasi bersama guna penertiban lalu lintas bagi kendaraan angkutan umum;
 - 14) Memberikan pembinaan terhadap awak / kru kendaraan angkutan umum tentang tata tertib berlalu lintas;
 - 15) Menambah fasilitas, sarana dan prasarana perhubungan serta memelihara secara maksimal terhadap perlengkapan lalu lintas dan prasarana perhubungan yang sudah ada.
- b. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, adalah sebagai berikut :
- 1) Peningkatan sarana prasarana dan gedung sekolah yang memenuhi standar kelayakan dengan menambah alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana sekolah;
 - 2) Peningkatan rehabilitasi gedung sekolah;



- 3) Alokasi anggaran untuk bantuan siswa yang tidak mampu ditambah sehingga mereka dapat meneruskan sekolah yang lebih tinggi;
 - 4) Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga pembuatan lintasan sepatu roda dan pemindahan, pengurukan serta pembuatan panjat tebing;
 - 5) Perlunya adanya pembinaan yang berjenjang dari tingkat SD sampai SMA dengan sering mengadakan perlombaan dan pertandingan sehingga akan menciptakan atlet-atlet yang handal;
 - 6) Perlunya mengadakan diklat pada pemuda yang mengacu pada keterampilan untuk hidup (life skill) agar pemuda bisa berdikari sendiri;
 - 7) Meningkatkan anggaran untuk biaya operasional peningkatan pembinaan, pendampingan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- c. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, adalah sebagai berikut :
- 1) Penerapan kebijakan persalinan di Puskesmas mulai 01 Januari 2015, sehingga diharapkan dengan kelengkapan peralatan dan kesiapan tenaga kesehatan yang memadai dapat menekan angka kematian tersebut;
 - 2) Pelaksanaan Program EMAS dengan memperkuat sistem rujukan dalam mengatasi kegawatdaruratan kebidanan;
 - 3) Peningkatan peran serta lintas sektor melalui koordinasi secara berjenjang terus diupayakan, mengingat indikator program kesehatan tidak mungkin dapat diselesaikan jajaran kesehatan tanpa dukungan semua pihak;
 - 4) Pembinaan IRT dan sosialisasi termasuk penertiban izinnya;
 - 5) Ketentuan kriteria tentang masyarakat miskin secara obyektif harus dilakukan sebelum mendapat pengesahan dari camat;
 - 6) Dukungan semua stakeholder termasuk camat membantu sosialisasi pada setiap Kesempatan baik kepada kader/perangkat dan pihak-pihak lain yang memungkinkan informasi sampai kepada masyarakat/sasaran;
 - 7) Ada Anggaran ADD/APBDes untuk Desa Siaga / Operasional FKD dan mendukung operasionalisasi UKBM (Posyandu), sehingga akses dan pemanfaatannya oleh masyarakat dapat meningkat;
 - 8) Pemantapan lintas program dan lintas sektor untuk penanggulangan gizi buruk;



- 9) Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya garam beryodium bagi kesehatan;
 - 10) Pelaksanaan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian ASI eksklusif dengan memberikan pembinaan kepada Bidan yang melanggar peraturan tersebut;
 - 11) Meningkatkan koordinasi teknis Tim PP-ASI dan mensosialisasikan PP-ASI di Tingkat Kecamatan sampai ke Desa;
 - 12) Melaksanakan kelas hamil tingkat desa;
 - 13) Melaksanakan Sosialisasi dan KIE di sekolah dan luar sekolah;
 - 14) Pembinaan kesehatan pada kelompok Pra Usila dan Usila;
 - 15) Mensosialisasikan pada masyarakat tentang penggunaan kartu kepesertaan dalam berobat ke Puskesmas;
 - 16) Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam mengawal Instruksi Bupati Grobogan Nomor 442/5362/VII Tahun 2012 tentang Tindak Lanjut Kinerja Hasil Kalakarya Daerah Bermasalah Kesehatan Kabupaten Grobogan, sehingga peran masing-masing sektor dan khusus bagi tenaga kesehatan secara konkrit dapat dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Grobogan;
 - 17) Pelaksanaan Kalakarya bidang kesehatan secara rutin tiap tahun dalam rangka melaksanakan evaluasi program-program kesehatan dengan menyinergikan kebijakan kesehatan dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk memperoleh dukungan secara aktif oleh pihak-pihak terkait;
 - 18) Koordinasi lintas sektor tentang perlunya anggaran, untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit;
 - 19) Mengusulkan pada Pemerintah dan kerjasama dengan Universitas untuk penambahan Tenaga Medis dan Paramedis.
- d. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, adalah sebagai berikut :
- 1) Diusulkan terbitnya perda baru tentang penataan ruang;
 - 2) Perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang penataan ruang dan bangunan;
 - 3) Penyusunan database perencanaan pembangunan terkait bidang Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan secara menyeluruh dan berkesinambungan;



- 4) Penyusunan SPM bidang cipta karya tata ruang dan kebersihan;
- 5) Peningkatan sinkronisasi antar SKPD bidang perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- 6) Adanya pelatihan, bintek, kursus ataupun seminar dalam rangka peningkatan SDM pada pegawai/karyawan;
- 7) 5 (lima) kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini;
- 8) Optimalisasi sumber daya yang tersedia diikuti penambahan sumber daya organisasi pengelola urusan perumahan;
- 9) Penyusunan database secara menyeluruh dan berkesinambungan terkait urusan perumahan;
- 10) Fasilitasi peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan perumahan;
- 11) Diusulkan penambahan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan urusan perumahan;
- 12) Fasilitasi secara berkesinambungan koordinasi dengan masyarakat terkait urusan perumahan;
- 13) Meningkatkan minat masyarakat Grobogan dengan sering menyelenggarakan pagelaran seni lokal agar masyarakat tahu dan mencintai radisi lokal;
- 14) Mengenalkan seni budaya asli Grobogan dengan menyelenggarakan parade seni supaya masyarakat mengenal seni budaya lokal;
- 15) Menggali lagi upacara tradisional yang ada di Kabupaten Grobogan dengan cara mendokumentasikan upacara tradisional yang ada di Kabupaten Grobogan;
- 16) Menyelenggarakan setiap tahun pembuatan Film dan pembuatan skenario film agar masyarakat semakin meyakini dan tahu tentang pembuatan film dan Skenario dengan baik dan benar;
- 17) Memberikan sosialisasi kepada Organisasi seni akan pentingnya kelengkapan Organisasi seperti Susunan Organisasi, Sekretariat, Akte Berdirinya yang sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM juga bantuan alat kesenian untuk organisasi tradisional supaya tidak hilang;
- 18) Peningkatan bantuan ternak / ikan dengan perbankan antara lain melalui Program KKPE(Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan Program KUPS (Kredit Usaha Peternakan Sapi);
- 19) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani peternak dan pembudidaya ikan melalui pembinaan, pelatihan dan study lapang;



- 20) Diusulkan penambahan tenaga teknis peternakan dan kedokteran hewan;
- 21) Diklat tenaga profesi penera UTTP dan memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan tera, tenaga penara dan peralatan dari Balai Metrologi Semarang;
- 22) Meningkatkan monitoring dan pengawasan distribusi dan memberikan pembinaan kepada distributor dan pengecer serta kelompok tani;
- 23) Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan / atau jasa ditoko, pasar dan toko modern;
- 24) Meningkatkan monitoring dan laporan sehingga dapat diketahui perkembangannya untuk dapat dipakai dasar mengambil kebijakan bagi pimpinan;
- 25) Melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif ke pedagang dan mengoptimalkan personil yang ada di UPTD Pasar Daerah;
- 26) Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;
- 27) Melakukan sosialisasi/diskusi berkaitan dengan lokasi yang ditempati bukan merupakan aset Pemkab, melainkan milik pihak ke-3 (PT. KAI) dengan ikatan perjanjian sewa;
- 28) Perlu tambahan alokasi anggaran pada tahun-tahun mendatang agar dapat mengikuti event-event pameran di tingkat Nasional / antar Provinsi;
- 29) Perlunya pelatihan motif desain batik secara kontinue;
- 30) Melaksnakan pelatihan ketrampilan produk kulit secara kontinue;
- 31) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan produksi kulit dengan catatan kelompok mau dan memiliki Badan Hukum;
- 32) Melaksanakan pelatihan ketrampilan produksi olahan dari bahan baku jagung secara kontinue;
- 33) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan produksi jagung;
- 34) Meningkatkan variasi produk bambu;
- 35) Meningkatkan ketrampilan pengrajin tenun;
- 36) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan tenun dengan catatan kelompok mau dan memiliki Badan Hukum;
- 37) Memperluas jaringan pemasaran;
- 38) Melaksanakan pelatihan ketrampilan industri olahan abon dengan bersinergi dengan industri abon Kabupaen Boyolali;
- 39) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan produksi olahan abon;



- 40) Melaksanakan pelatihan ketrampilan pengrajin susu, yoghurt berbasis kedelai secara kontinue;
 - 41) Memberikan tambahan bantuan mesin peralatan produksi susu, yoghurt dengan catatan kelompok mau dan memiliki Badan Hukum;
 - 42) Melaksanakan pelatihan ketrampilan industri olahan aneka buah dan sayuran secara kontinue;
 - 43) Memberikan tambahan bantuan mesin Vacuum Drying aneka buah dan sayuran;
 - 44) Peningkatan ketrampilan desain motif batik;
 - 45) Magang kerja ke industri batik yang lebih maju;
 - 46) Pembinaan yang lebih intensif terhadap kelompok tani nelayan maupun UPR – UPR yang ada;
 - 47) Bantuan paket modal dan alih teknologi perikanan;
 - 48) Memasyarakatkan gemar makan ikan (Gemarikan) dan pelatihan pengolahan produk berbahan baku ikan;
 - 49) perlunya dibangun pasar benih dan pasar ikan untuk menampung hasil usaha perikanan dari peternak ikan dan meningkatkan alur distribusi ikan dan benih ikan;
 - 50) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti mainan anak-anak disetiap lokasi obyek wisata dan penghijauan diliokasi obyek wisata, peningkatan infrastruktur jalan yang memadai sebagai akses menuju ke lokasi obyek wisata;
 - 51) Mengadakan sosialisasi pada kelompok sadar wisata tentang pentingnya kebersihan dan ketertiban dilingkungan obyek wisata;
 - 52) Mengadakan pendataan yang akurat obyek wisata yang potensial di Kabupaten Grobogan, mencarikan investor untuk ikut mengelola obyek wisata dan mengadakan koordinasi pada seniman dan menggali potensi budaya yang dapat menjadi wisata budaya di Kabupaten Grobogan, aktif mengikuti pameran diluar daerah Kabupaten Grobogan guna mempromosikan wisata di Kabupaten Grobogan;
 - 53) Memberikan kemudahan izin pada investor dalam penanaman modalnya untuk Pariwisata di Kabupaten Grobogan.
- e. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, adalah sebagai berikut :



- 1) Peningkatan SDM melalui Pembekalan Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah;
- 2) Rekonsiliasi pada akhir tahun anggaran antara DPPKAD dengan SKPD;
- 3) Mengusulkan kepada Pemerintah dalam hal pengisian CPNS mendatang agar dapat dipenuhi kebutuhan pegawai khususnya untuk tenaga operasional pemeriksa / pejabat fungsional, dengan latar belakang pendidikan Ekonomi, Hukum, Teknik dan Apoteker guna mendukung kinerja pengawasan;
- 4) Mengusulkan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan anggaran di tahun mendatang Inspektorat diberikan tambahan plafon anggaran guna peningkatan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu untuk tambahan penghasilan berupa Tunjangan Kesejahteraan Kelangkaan Profesi;
- 5) Kegiatan Pelatihan Damage and Loss Assessment (DALA) tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2016 karena sudah dianggarkan. Oleh karena itu atas hal sebagaimana tersebut pada tahun 2015 yang lalu, pada tahun 2016 ini tidak akan terjadi lagi;
- 6) Peningkatan peralatan kearsipan dan depo arsip;
- 7) Diusulkan penambahan tenaga / pegawai PNS yang berkompeten dan tenaga fungsional yaitu arsiparis;
- 8) Mengadakan sosialisasi administrasi kependudukan sampai tingkat desa/kelurahan;
- 9) Mengusulkan UPTD mengingat penduduk dan wilayah Kab. Grobogan luas dan penduduknya diatas 1 juta jiwa;
- 10) Perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kapasitas personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kurang maksimal;
- 11) Perlunya pembinaan dan masukan pendapat di antara komponen masyarakat, agar dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing;
- 12) Perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif melalui pertemuan dengan para Pedagang Kaki Lima dan paguyuban Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan serta penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda;
- 13) Perlunya diadakan kajian ulang tentang perijinan pelaksanaan penambangan galian C yang selama ini masih berlangsung;



- 14) Penegakan perda melalui pelaksanaan Yustisi yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi terkait;
 - 15) Perlunya penambahan personil / pegawai dan meningkatkan ketrampilan pada pegawai yang ada semaksimal mungkin;
 - 16) Mengatur waktu sebaik mungkin, dalam hal pembagian jadwal pelayanan pemberkasan dan melaksanakan monitoring.
- f. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, adalah sebagai berikut :
- 1) Dibuat buku prakiraan kebutuhan alat tulis kantor untuk bulan yang akan datang;
 - 2) Pemeliharaan dilaksanakan tidak pada saat rusak, namun secara berkala tiap bulan dengan batasan anggaran yang minimal;
 - 3) Pengambilan sampel harus memperhatikan keberadaan air yang akan diambil;
 - 4) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan LH dengan cara sosialisasi, pembinaan, menegur pelaku usaha agar lebih tertib dalam pelaporan;
 - 5) Mengundang kader-kader LH ketika ada acara/event LH;
 - 6) Sosialisasi ke masyarakat ditingkatkan, penambahan dana untuk mengadakan himbauan/slogan;
 - 7) Telah dilakukan sosialisasi pengelolaan sampah, penyuluhan kepada masyarakat melalui pemasangan papan informasi;
 - 8) Fasilitasi peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan pekerjaan umum;
 - 9) Fasilitasi secara berkesinambungan koordinasi dengan masyarakat terkait urusan pekerjaan umum;
 - 10) Memberi teguran, saran dan bimbingan untuk mengurus perijinan pertambangan;
 - 11) Koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jateng untuk mendapatkan fasilitasi pemeliharaan;
 - 12) Menghimbau kepada agen LPG untuk memecah atau membuka pangkalan baru di Desa/kelurahan yang belum ada pangkalan LPG 3 Kg;
 - 13) Konsultasi dan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jateng dan Badan Geologi Bandung;
 - 14) Memberikan saran dan bimbingan untuk segera mengurus perijinan air tanah.



7. Secara umum, capaian kinerja Sasaran Strategis tahun kelima RPJMD Kabupaten Grobogan 2011 – 2016 tercapai dengan **kualifikasi Sangat Baik (skor = 124,496%)** naik 13,487% dibanding capaian kinerja pada Tahun 2014 (skor 2014 = 111,009%). Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun kelima juga dapat dilihat dari pencapaian target beberapa indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Grobogan.
8. **Prestasi/penghargaan** yang diperoleh Kabupaten Grobogan selama tahun 2015, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghargaan Nasional Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan;
 - b. Juara I Nasional Lomba Website Tingkat Kementerian Pertanian;
 - c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional a.n. SMP 3 Gubug;
 - d. Juara I Tingkat Nasional lomba Petugas Inseminasi Buatan (Inseminator) a.n. Budi Tri Widodo;
 - e. Juara II Tingkat Nasional lomba Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) a.n. UPP Mitra Usaha Mina;
 - f. Juara II Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Padi a.n. Kelompok Tani “Sumber Urip” Desa Pulutan Kecamatan Penawangan;
 - g. Juara II Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Jagung a.n. Kelompok Tani “Makaryo” Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi;
 - h. Juara III Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Kedelai a.n. Kelompok Tani “Wargo Asih” Desa Pojok Kecamatan Pulokulon; serta masih banyak penghargaan lainnya dari tingkat provinsi.

Dari uraian diatas, secara makro Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 telah menyelenggarakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya, meliputi urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sehingga dapat berjalan secara baik dan optimal.

Disadari bahwa pelaksanaan pembangunan saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh. Hal ini bukan karena tidak mau atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada dan perubahan lingkungan



strategis yang sangat dinamis. Oleh karena itu, kepada semua pihak diharapkan dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan kinerja ini, dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta kepuasan masyarakat di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Purwodadi, 24 Maret 2016

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI, SH, MM